

# Pemberdayaan Masyarakat

*by* Sriati Sriati

---

**Submission date:** 09-Oct-2022 04:11PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1920397288

**File name:** BUKU\_PM-\_Revisi-turnitin\_Sriati.pdf (2.6M)

**Word count:** 33694

**Character count:** 234322

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Ketentuan Hukum Pidana**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**  
**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*Prof. Dr. Ir. Sriati, MS.*





**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**Prof. Dr. Ir. Sriati, MS.**

UPT. Penerbit dan Percetakan  
Universitas Sriwijaya 2022  
Kampus Unsri Palembang  
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139  
Telp. 0711-360969  
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com  
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 005.140.1.6.2021  
Anggota IKAPI No. 001/SMS/96

158 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

**ISBN : 978-623-399-041-7**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya buku ini dapat diselesaikan.

Buku dengan judul **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** ditulis dengan merujuk pengalaman penulis lebih dari 37 tahun terlibat dalam kegiatan akademik (mengajar dan membimbing mahasiswa) serta kegiatan lapangan yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menyampaikan prinsip dan wawasan sehingga menjadi rujukan mahasiswa tingkat sarjana dan pascasarjana, melengkapi rujukan yang lebih dahulu.

Ucapan terima kasih para kolega, sahabat dan juga Pimpinan Universitas Sriwijaya, beserta Pimpinan Fakultas Pertanian, dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, khususnya pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Program Doktor Ilmu Pertanian, Program S2-Agribisnis, Program S2, dan S3 Administrasi Publik, Program S2 dan S3-Ilmu Lingkungan, Program S2-Kependudukan, dan Program S2-Sosiologi; Ucapan terimakasih juga disampaikan untuk suamiku tercinta Dr. Ir. Gatot Priyanto, MS beserta anak-anakku tersayang : Bagus Pamuji, Dwiretno Pangastuti, Dyahati Wahyurini dan Dian Mustikarini, atas semua dukungannya.

Buku ini pada beberapa bagiannya mungkin masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Penulis mengharapkan masukan konstruktif agar karya ini di masa mendatang lebih sempurna. Semoga bukui ini merupakan rujukan yang tepat bagi yang membutuhkan dan merupakan bagian dari karya yang lebih sempurna di kemudian hari.

Palembang, 12 Januari 2022

Penulis

*Dedikasi untuk*  
*Ayahnda Mukasir, ibunda Djuwariah,*  
*Ayahnda K, Soetomo, ibunda Suparmiasih*  
*Dan beserta keluarga besarnya*

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. KONSEP PEMBANGUNAN	1
BAB II. KONSEP PEMBERDAYAAN	11
A. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	11
B. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat	14
C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	21
BAB III. PROSES DAN TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23
A. Proses Pemberdayaan Masyarakat	23
B. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	35
BAB IV. RUANG LINGKUP DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47
A. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat	47
B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	54
BAB V. PERANAN PEKERJA PENGEMBANGAN MASYARAKAT	57
BAB VI. PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	61
A. Pengertian Partisipasi	61
B. Bentuk (tahap) Partisipasi	62
C. Cara menggerakkan Partisipasi	63
D. Lingkup Partisipasi dalam Pembangunan	65
BAB VII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMISKINAN	73
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	73
B. Konsep Kemiskinan (definisi, jenis, ukuran)	74

BAB VIII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)	91
A. Pengertian Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)	91
B. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	92
C. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	95
D. Kajian empiris Pemberdayaan UMKM	99
 BAB IX. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL	 105
A. Pendidikan Non Formal	105
B. Ciri-ciri Pendidikan Nonformal	106
C. Asas Pendidikan Nonformal	107
D. Beberapa kajian empiris pemberdayaan masyarakat Melalui pendidikan Non Formal	108
E. Penyuluhan Pertanian sebagai bentuk Pemberdayaan Masyarakat	113
 BAB X. IMPLEMENTASI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN	 117
A. Program-Program Pemberdayaan Petani	117
B. Pengukuran Keberhasilan Pemberdayaan	126
 BAB XI. PERSPEKTIF ADAPTASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI COVID 19, ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0	   131
A. Konsep Adaptasi	132
B. Konsep Ketahanan Pangan keluarga	133
C. Konsep Society 5.0	135
 DAFTAR PUSTAKA	 137
INDEKS	147

## BAB I. KONSEP PEMBANGUNAN

Secara etimologi *Pembangunan* berasal dari kata dasar *bangun*, yang mendapat awalan *pem-* dan akhiran *-an* guna menunjukkan sesuatu tentang *membangun*. Kata *bangun* mempunyai empat makna, yakni (1) *sadar* atau *siuman*, (2) *bangkit* atau *berdiri*, (3) *bentuk*, dan (4) *membuat*, *mendirikan*, atau *membina*. Jadi kata *Pembangunan* meliputi aspek *anatomik* (bentuk), *fisiologik* (kehidupan), dan *behavioral* (perilaku). Sementara, secara ensiklopedik kata *pembangunan* mengandung konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep *pembangunan* antara lain adalah : (1) pertumbuhan (*growth*), (2) rekonstruksi (*reconstruction/recovery*), (3) modernisasi (*modernization*), (4) westwernisasi (*westernization*), (5) perubahan sosial (*social change*), (6) pembebasan (*liberalalitation*), (7) pembaharuan (*innovation*), (8) pembangunan bangsa (*nation building*), (9) pembangunan nasional (*national development*), (10) pengembangan, (11), pembinaan, (12) pembangunan manusia seutuhnya, (13) Pembangunan berwawasan lingkungan, dan (14) Perberdayaan.

Masing-masing konsep tersebut mempunyai makna dan aspek yang menjadi fokus kajian yang berbeda, sesuai dengan pencetus-nya pada jamannya. Makna konsep *pembangunan* terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat pada jamannya. Ulasan mengenai konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

### 1. Pertumbuhan (*growth*)

Pertumbuhan merupakan konsep ilmu ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi, yang artinya: kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka waktu tertentu (Thirlwall, 1974). Terkait dengan konsep pertumbuhan, (Rostow, 1960) menyebutkan ada lima tahap utama pertumbuhan, yaitu :

- a. **Masyarakat tradisional**, cirinya keterikatan mereka pada lingkungan dan sistem kemasyarakatan bersifat feodal.

- b. Tahap transisional**, cirinya pada masyarakat peralihan ini muncul kelas menengah yang menguasai bisnis perdagangan, dan juga muncul aktivitas sosial baru pada bidang transportasi dan modernisasi pertanian. Pada tahap ini dipersiapkan fase tinggal landas.
- c. Tahap tinggal landas**, cirinya adalah adanya peningkatan investasi dan pendapatan riil masyarakat, terjadinya perubahan mendasar pada bidang industri, antara lain meluasnya peranan sektor industri unggul.
- d. Tahap pemantapan (pendewasaan)**, cirinya adalah telah digunakan teknologi tinggi, sektor industri mempengaruhi sektor-sektor lainnya, dan tumbuhnya manajemen profesional.
- d. Tahap konsumsi massa tinggi**, ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Michael Todaro (1983), faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. Akumulasi modal (tanah, peralatan, sumberdaya manusia)
- b. Perkembangan penduduk (peningkatan tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitas)
- c. Kemajuan teknologi, yakni hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan –pekerjaan tradisional.

Selanjutnya diungkapkan Todaro (1983) dalam Ndraha (1987) bahwa indikator pertumbuhan ekonomi meliputi :

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Bila pendapatan masyarakat melebihi jumlah penduduk maka pendapatan per kapita juga meningkat.
2. Tingkat pertumbuhan produktivitas. Tingkat produktivitas antara lain ditunjukkan oleh tingkat efisiensi kerja ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
3. Tingkat transformasi struktur ekonomi. Contohnya dari ekonomi barter ke ekonomi uang, dari usaha rumah tangga ke perusahaan besar.

4. Tingkat transformasi sosial, politik dan ideologi, yakni perubahan dan pematapan sistem sosial, politik dan ideologi nasional.
5. Jangkauan ekonomi internasional, yakni seberapa jauh pengaruh ekonomi nasional negara yang bersangkutan terhadap ekonomi internasional.

Apa kelemahan konsep pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi?

Kelemahan konsep pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi adalah adanya kemungkinan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak didukung oleh perubahan masyarakat. Tanpa ada dukungan perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap bidang sosial, contohnya pengangguran, dehumanisasi dan sebagainya (Ndraha, 1987).

## **2. Rekonstruksi :**

Konsep rekonstruksi ekonomi atau pemulihan ekonomi kurang populer. Konsep ini lebih diutamakan pada upaya membangun kembali perekonomian suatu negara. Misalnya dikenakan pada negara-negara sekutu yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Salah satu program yang terkenal adalah Rencana Marshall. Marshall berpendapat bahwa: kemiskinan dan kekacauan ekonomi di berbagai negara di Eropa merupakan bahaya bagi stabilitas politik di negara-negara tersebut. Maka dianjurkan menyusun bersama rencana pembangunan ekonomi untuk Eropa Barat (*European Recovery Program*). Menurut Edgar Owens dan Robert Shaw dalam "*Pembangunan ditinjau Kembali (1980)* **yang dikutip** Ndraha (1987), Rencana Marshall merupakan upaya untuk menegakkan kembali Eropa dari kehancuran akibat Perang Dunia ke II.

## **3. Modernisasi.**

Menurut Willard A. Beling dan George O. Toten dalam bukunya : *Modernisasi, Masalah dan Model Pembangunan (1970)* , dijelaskan bahwa Modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi Industri di Inggris (1760-1830) dan



revolusi politik di Perancis (1789-1794). Ciri yang menonjol dalam proses modernisasi adalah : perubahan teknik industri dan cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang dihasilkan oleh Revolusi Industri didukung oleh penemuan-penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan seperti penemuan James Watt (1769). Sehubungan dengan hal tersebut J.W. Schoorl dalam *Modernisasi* (1980) mendefinisikan modernisasi sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan, atau semua aspek-aspek masyarakat. Definisi tersebut sejalan dengan konsep Syed Hussein Alatas (Hans Dieter Ever, 1873) : Modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan yang meliputi semua segi kehidupan manusia pada tingkat yang berbeda-beda; pertama di Dunia Barat, kemudian berbaur di dalam sisa dunia lainnya melalui berbagai cara dan kelompok dengan tujuan utama untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman dalam arti seluas-luasnya, sepanjang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Modernisasi diukur dari sejauhmana bangsa yang bersangkutan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab.

#### **4. Westernisasi**

Istilah atau konsep Westernisasi muncul, karena modernisasi berasal dari Dunia Barat maka modernisasi identik dengan proses pembaratan (*westernisasi*). Modernisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk mencapai taraf yang sama dengan yang terdapat di Dunia Barat. Fred W. Riggs dalam Beling dan Totten 1970) menyebut modernisasi sebagai Usaha menandingi Barat. W.H. McNeill (1965), menyatakan bagaimanapun juga Pertumbuhan dikemudian hari, kebudayaan dunia tetap mengandung ciri-ciri Barat. Westernisasi hanyalah dikenakan pada dunia Non Barat pada abad 20.

#### **5. Perubahan Sosial**

Perubahan Sosial didefinisikan sebagai perubahan lembaga-lembaga (*institutions*) masyarakat, yaitu perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai sosial, sikap, dan pola perilaku kelompok (Selosoemarjan dalam *Social Change in*

Yogyakarta, 1962; Milton J. Esman dalam Josep W. Eaton, *Institution Building and Development*, 1972).

Menurut Esman dalam D.W. Thomas (1972) yang dikutip Ndraha (1987), terdapat 5 (lima) bentuk perubahan, yaitu :

- a. Perubahan evolusioner, yakni perubahan yang tidak dikendalikan dengan lingkungan permisif.
- b. Perubahan revolusioner, adalah perubahan yang bisa dikendalikan dan bisa juga tidak, tetapi dengan lingkungan yang dimanipulasikan.
- c. Perubahan dialektikal, yakni perubahan yang tidak dikendalikan dan lingkungan permisif
- d. Perubahan yang dipaksakan, adalah perubahan yang dikendalikan dan dengan memanipulasikan lingkungan
- e. Perubahan terkendali, adalah perubahan yang dikendalikan tetapi lingkungan yang permisif.

Masalah utama yang dihadapi dalam modernisasi adalah berbagai faktor yang merintanginya terjadinya perubahan sosial : (a) bersifat kolektif, biasanya dilakukan berdasarkan dalih demi ketertiban dan keamanan, dan (b) bersifat individual, biasanya bersifat intelektual. Keduanya dilatarbelakangi oleh ketakutan terhadap hancurnya tradisi yang telah dipegang sejak lama (Horowitz, 1966, 322)

### **Faktor-faktor yang mendorong perubahan Sosial**

Daniel Lerner (1962,71) menyebutkan ada empat faktor pendorong perubahan sosial yang sekaligus sebagai indikator modernitas suatu masyarakat, yaitu :

1. Urbanisme, yaitu mobilitas fisik dan pada gilirannya mempengaruhi mobilitas sosial.
2. Kemampuan membaca dan menulis
3. Partisipasi Media
4. Empati, yaitu kemampuan melihat diri sendiri didalam situasi orang lain.

Selosoemardjan (1962, 379) menyebutkan faktor pendorong perubahan sosial terdapat dibidang biologik, teknologik, dan

ideologik kehidupan masyarakat. Modernisasi tanpa didukung perubahan sosial tidak efektif. Di berbagai wilayah pada umumnya kelompok elit tetap mempertahankan kedudukan sosial yang menguntungkan mereka, sehingga tumbuh gerakan yang dikenal sebagai *gerakan pembebasan*.

## **6. Pembebasan**

Pembaharuan berarti menilai kembali keadaan setiap kelompok masyarakat dan mengadakan perbaikan kualitatif, baik dalam kelompok maupun individu. Pembangunan bukanlah tujuan melainkan alat untuk memanusiawikan manusia. Aliran ini disebut juga Mazhap Perancis (French School).

Menurut Gustavo Guierrez Merino, pembangunan yang dimaksud Mazhap Perancis lebih tepat disebut pembebasan (*leberation*). Karena sebagian besar dilhami oleh nilai-nilai teologis-etis, maka mazhap tersebut lazim disebut juga *Teologi Pembebasan*.

Bagi kaum leberasionis, keberhasilan pembangunan tidaklah diukur dengan jumlah keuntungan yang dicapai, melainkan dengan cara bagaimana perubahan terjadi. Keuntungan yang nyata memang diperlukan, tetapi ukuran keberhasilan yang terpenting ialah sejauhmana masyarakat yang bersangkutan membangun secara otonom, kreatif, dan mampu mengontrol faktor-faktor perubahan sosial.

## **7. Pembaharuan**

Pembaharuan dan modernisasi didorong oleh penemuan-penemuan ilmiah (*inventions*), sementara terhadap perubahan sosial pembaharuan mempunyai pengaruh timbal balik. Pengertian inovasi sosial lebih luas. Inovasi adalah gagasan untuk mencapai tujuan sosial tertentu dengan cara baru. Di Dunia Ketiga Konsep inovasi meluas ke bidang ideologi. Hal ini ditandai dengan sebutan Orde Baru.

Terkait dengan konsep pembaharuan, Rogers and Shoemaker (1971) menyebutkan bahwa inovator (agen pembaharu) adalah tokoh profesional yang mempengaruhi atau megarahkan keputusan inovasi orang lain sesuai dengan yang diinginkan lembaga yang diwakilinya.

## **8. Pembangunan bangsa**

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Sondhang P. Siagian, 1974). Pembangunan meliputi segala segi aspek kehidupan bangsa : ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta hubungan antar bangsa.

Pembangunan bangsa lebih ditujukan pada upaya pemantapan dan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, wawasan ideologi, dan pencegahan berbagai perpecahan konflik, dan sebagainya konflik antar suku, antar agama, antar daerah, dan antar kelompok kepentingan.

## **9. Pembangunan nasional (*national development*).**

Pembangunan nasional lebih erat kaitannya dengan pembangunan politik dari pada pembangunan lainnya. Pembangunan bangsa merupakan bagian integral pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan setiap bangsa Dunia ketiga bersifat multidimensional, yaitu yang meliputi segi kehidupan nasional : politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Maka pembangunan nasional meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dan pembangunan sosial (Ponsioen, 1968, Hans Dieter Evers 1973, Siagian, 1974). Pembangunan nasional harus didukung oleh kemampuan politik (ideologi, sistem politik), kemampuan ekonomi (sumber-sumber). dan kondisi sosial (perubahan sosial) dan pada gilirannya harus mampu menegakkan ketahanan nasional negara yang bersangkutan.

## **10. Pengembangan**

Dunia ketiga disebut Developnig Countries (negara yang sedang berkembang). Dulu dikenal dengan sebutan masyarakat primitif. Hal ini kurang tepat, karena ternyata Dunia Ketiga umumnya berkebudayaan tinggi dan mempunyai potensi dan sumberdaya berlimpah disamping kemerdekaan nasional sebagai modal utama.

Kelemahan dunia Ketiga terutama dibidang : teknologi dan ilmu pengetahuan (bidang pengembangan).

### **11. Pembinaan**

Istilah atau konsep pembinaan, di Indonesia semakin dikenal sejak 1966, ketika pemerintah berusaha menghancurkan sisa-sisa G 30 S PKI. Operasi militer biasanya didukung oleh operasi teritorial berupa usaha rehabilitasi dan pemulihan ketertiban umum. Dalam hal ini pemerintah berusaha meluruskan kembali pola-pikir dan pola tindak kelompok-kelompok masyarakat yang sementara menyeleweng dari garis yang telah ditetapkan. Misal di Jawa Timur : dikenal Operasi Bina Wilayah, suatu operasi teritorial semimiliter. Keberhasilan tersebut kemudian dipelajari dan dijadikan pangkal tolak program yang disebut *pembinaan wilayah*, yang bermaksud menyiapkan kondisi wilayah - penduduk, alam, lingkungan, dan sumber-sumbernya - untuk menunjang ketahanan nasional. *Pembinaan ideologi* merupakan bentuk khusus pembinaan wilayah. Pembinaan ideologi bermuka dua, pertama menjelaskan ajaran mana yang keliru, dan kedua mengajarkan ideologi yang dipandang benar.

### **12. Pembangunan**

- a. Dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan GNP secara konsisten sebesar 3 sampai 7 % atau lebih disertai perubahan struktural di bidang agraria, industri, dan jasa, produksi, dan lapangan kerja. Sikap hidup semakin rasional dan penerapan teknologi meningkat.
- b. Perencana pembangunan dipengaruhi oleh anggapan bahwa pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan dapat dicapai melalui industrialisasi. Terdapat dua cara pendekatan industrialisasi, yaitu :  
Pertama, cara yang banyak digunakan, yakni pemusatan perhatian pada upaya untuk merangsang faktor industrialisasi, antarlain penggunaan teknologi dari luar (modernisasi). Kedua, cara yang

kurang populer yaitu upaya untuk menggerakkan potensi dalam negeri dan menggunakan teknologi tradisional.

Bagaimana dampak pembangunan dengan pendekatan industrialisasi tersebut ? Apa implikasinya bagi konsep pembangunan yang ideal ?

Michael Todaro (1978) : ada tiga konsep berkaitan dengan pembangunan, yaitu : *kebutuhan hidup* (pertumbuhan ekonomi), *kebebasan memilih* (perubahan sosial), dan *harga diri* (nilai etik). Coralie Bryant dan Louise White (1982) : pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari definisi tersebut: *capacity*, *equity*, *empowerment*, *sustainability*, dan *interdependence*.

### **13. Pembangunan Nasional Indonesia**

Pembangunan nasional Indonesia adalah amanat konstitusi, maupun batang tubuh UUD 1945, mengandung ketentuan-ketentuan tentang cita-cita bangsa. Indonesia setidaknya mempunyai : *Ideologi Pembangunan* (Pancasila), *hakikat pembangunan* (pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia), dan *strategi pembangunan* (trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik). Pembangunan berkelanjutan telah merupakan pilihan yang tepat, dan ini perlu didukung dengan aspek pemberdayaan yang kuat. Hubungan pemberdayaan dengan pembangunan sangat erat, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Uraian tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih rinci disampaikan pada bab-bab berikut.

### **14. Pembangunan Berkelanjutan .**

Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa yang akan datang dengan menitik beratkan pada daya dukung lingkungan,

pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu : (1) *Economically viable* : pembangunan ekonomi yang dinamis; (2) *Socially-politically acceptable and culturally sensitive* : yakni pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima erta peka terhadap aspek-aspek budaya., dan (3) *Environmental friendly* : ramah lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur (urban sprawl) sehingga kota menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga pilar utama yang saling berkesinambungan, diantaranya adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi., yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi.
2. Keberlanjutan sosial, yaitu menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial.
3. Keberlanjutan lingkungan, yaitu dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui *zero emission*.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sektor ekonomi melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerin, guna mengimplementasikanya pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan kota hijau yang memiliki kualitas hidup baik, dan kondisi longkuhan yang kondusif. Dari uraian di atas jelas bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bertumpu (berorientasi) pada pertumbuhan produksi melainkan pada adanya pemerataan hasil pembangunan, dan pemanfaatan sumberdaya yang masih menisakan untuk generasi penerus. Perbedaan makna beberapa konsep pembangunan dan berbagai pencirinya tersebut akan berdampak pada pendekatan dan strategi penyelesaian masalah pembangunan yang ada sesuai dengan masanya.

## **BAB II. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **A. Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Beberapa ahli mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sesuai latar belakang keilmuannya. Carver dan Clatter Back (1995) **mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya memberikan keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.** Shardlow (1998) mengatakan bahwa, pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam konsep pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya (energi) manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan (*competency*), kepercayaan (*confidence*), wewenang (*authority*) dan tanggungjawab (*responsibility*) dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan (*activitas*) organisasi untuk meningkatkan kinerja (*performance*) sebagaimana diharapkan (Hasan Bisri, 2000).

Sementara Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan adalah upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Berdasarkan terminologi itu, pemberdayaan merupakan usaha yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan, agar masyarakat tersebut dapat secara mandiri mengakses sumberdaya produktif yang diperlukan dalam proses produksinya. Selain itu mereka juga berkesempatan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan mau berpartisipasi dalam program pembangunan . Mereka yang termasuk dalam kelompok



rentan dan lemah adalah kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah, masyarakat desa, masyarakat nelayan, petani, termasuk kelompok perempuan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha memberikan penguatan (*strengthening*) atau memberikan daya (*empowerment*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kapasitas perorangan yang tergabung menyatu dengan komunitasnya guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat di lingkungannya. sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014). Menurut Ife (1995) dikutip Nasdian (2014) memaknai pemberdayaan adalah “membantu” masyarakat dengan memberikan kesempatan, kecakapan, dan pengetahuan agar kemampuan masyarakat meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas. Ginnodo (1997) secara sederhana mendefinisikan pemberdayaan adalah pemberian cara dan kesempatan untuk mengambil keputusan dan melakukan aksi-aksi yang berpengaruh langsung pada komunitas.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam mempersiapkan masyarakat dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dari beberapa definisi tampak bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari proses pengembangan masyarakat (*community development*). Menurut Nasdian (2014) Pengembangan masyarakat (*community development*) adalah konsep dasar yang menggaris bawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama, misalnya *community resource development*, *rural areal development*, *community economic development*, *rural revitalisation* dan *community based development*. *Community development* menggambarkan makna yang penting dari dua konsep yaitu *community* yang berarti kualitas hubungan sosial, dan *development* yang berarti perubahan kearah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual.

Ada beberapa pandangan dalam memaknai pengembangan masyarakat, sehingga beragam dalam orientasi nilai budaya dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ada yang bertujuan menggeser struktur kekuatan, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat bisnis, cara memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, memperbaiki kepemimpinan lokal, membangun kelembagaan baru, dan mengembangkan perencanaan fisik dan lingkungan. Sehingga muncullah definisi-definisi pengembangan masyarakat yang berbeda. Misalnya, ada yang menyebutkan bahwa *community development* sebagai suatu mobilisasi tingkat provinsi dan pusat untuk mendukung tujuan-tujuan perencanaan yang terdesentralisasi. Ada juga yang menyebutkan, *community development* sebagai suatu cara masyarakat memelihara otonomi yang dimilikinya. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memaknai pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai suatu proses sekelompok masyarakat dengan kekuatan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dan meningkatkan kemajuan bangsanya.

Menurut Poston (Nasdian, 2014), pengembangan masyarakat (*community development*), merupakan suatu proses membangun relasi atau hubungan sosial baik secara horizontal (dalam suatu komunitas) ataupun vertikal (antara dan antar komunitas). Pendapat lain yakni Christtensen dan Robinson (1980), menyebutkan bahwa pengembangan masyarakat (*community development*), merupakan sekelompok orang/masyarakat yang bekerja bersama untuk mengambil keputusan dan inisiatif untuk merubah kondisi ekonomi, sosial, budaya atau lingkungannya.

Berdasarkan beberapa pandangan dan definisi tersebut konsep pengembangan masyarakat (*community development*) telah berlaku secara internasional, dengan makna sebagai suatu proses, yaitu usaha masyarakat yang secara bersama-sama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberi kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut membantu memajukan bangsa.

## **B. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat :**

Menurut Ife (1995), pengembangan masyarakat sebagai perencanaan sosial perlu berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

1. Masyarakat disertakan dalam setiap proses pengambilan keputusan
2. Mensinergiskan metode komprehensif pembuat kebijakan dengan partisipasi warga
3. Memberikan peluang kepada warga untuk mendapatkan bantuan fisik, tenaga ahli, teknis, sarana serta insentif lainnya
4. Meningkatkan kinerja profesional sehingga lebih sensitif terhadap kebutuhan, perhatian dan aspirasi warga masyarakat.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (1957), yang dikutip oleh Nasdian (2014) disebutkan bahwa dalam pengembangan masyarakat terdapat 10 prinsip, yaitu :

1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat; program-program yang dibuat harus berdasar pada kebutuhan masyarakat.
2. Kemajuan lokal bisa diperoleh melalui usaha yg menyeluruh , melibatkan semua pihak, harus seimbang selaras dan menyusun program kegiatan bersama dengan beragam tujuan.
3. Tahap awal pembangunan program-program, perubahan sikap orang sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material.
4. Pengembangan masyarakat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah masyarakat, dan merevitalisasi potensi lokal yang efektif.
5. Setiap program harus berlandaskan pada dorongan, identifikasi, semangat dan pelatihan pemimpin setempat. .
6. Program-program pembangunan akan lebih berkembang jika diberikan kepercayaan lebih kepada partisipasi wanita dan kaum muda,
7. Perlu ada dukungan insentif dan ekstensif dari pemerintah agar proyek Swadaya masyarakat efektif.
8. Dalam skala nasional, penerapan program perlu pengaturan administratif yang spesifik, kebijakan yang konsisten, perekrutan



- dan pelatihan petugas, pemanfaatan sumberdaya lokal dan nasional, serta organisasi penelitian, ujicoba dan evaluasi
9. Dalam pengembangan masyarakat baik ditingkat lokal, nasional dan internasional, organisasi non pemerintah harus dimanfaatkan maksimal.
  10. Di tingkat nasional, kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang parallel

Ke sepuluh prinsip pengembangan masyarakat tersebut tidak saling berkaitan satu sama lain, dan secara bersama-sama berkontribusi untuk pencapaian tujuan.

Beberapa pakar menyebutkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan setidaknya ada terdapat empat (4) prinsip yang sering kali digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan tersebut yaitu : (1) kesetaraan, (2) partisipasi, (3) berkelanjutan, dan (4) keswadayaan atau kemandirian. Penjelasan masing-masing prinsip pemberdayaan tersebut sebagai berikut :

### **1. Prinsip Kesetaraan.**

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu dengan yang lain. Setiap pihak mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar mengajar.

### **2. Prinsip Partisipasi**

Program pemberdayaan yang menstimulasi kemandirian masyarakat harus bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun agar sampai pada tingkatan tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang

melibatkan pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

### **3. Prinsip Berkelanjutan**

Program pemberdayaan harus dirancang/disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan, meski pada awal kegiatan peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat, tetapi lambat laun peran pendamping berkurang, bahkan pada akhirnya ditiadakan karena masyarakat telah mampu mengelola sendiri.

### **4. Prinsip Keswadayaan Atau Kemandirian**

Prinsip keswadayaan yaitu menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain.

Terkait dengan prinsip pengembangan masyarakat tersebut Owin Jamasy (2001) menyebutkan bahwa: kunci keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan bukan hanya terletak pada keserasian kerjasama antar seluruh unsur *stakeholder*, melainkan pada paradigma baru pemberdayaan, yang diantaranya terangkup dalam 12 prinsip berikut yang sekaligus menjadi pertanda dari paradigma baru itu sendiri yakni : (1) *debirokratisasi*, (2) *partisipasi*, (3) *privatisasi*, (4) *transparansi*, (5) *akuntabilitas*, (6) *desentralisasi*, (7) *pemberdayaan yang bertumpu pada penguatan kapasitas lokal*, (8) *meningkatkan aspirasi hidup*, (9) *program yang berskala besar*, (10) *program yang integralistik*, (11) *melibatkan perempuan*, dan (12) *pemanfaatan organisasi sosial*. Kedua belas prinsip tersebut, dalam implementasinya perlu disikapi dengan.

Komitmen dari para pelaku pemberdayaan dan pembangunan sangatlah penting. Sebaik apapun konsep dan strategi yang dipaparkan, tanpa disertai dengan komitmen etika dan moral, maka semuanya akan sia-sia dan sepanjang itu pula permasalahan akan silih berganti.

Selanjutnya Ife (1995) menyebutkan prinsip pemberdayaan secara lebih rinci ada 22 prinsip, yaitu :

#### **1. Pembangunan terpadu (*Integrated Development*)**

2. Konfrontasi dengan kebatilan structural (*Confronting Structural Disadvantage*)
3. Hak asasi manusia (*Human Rights*)
4. Keberlanjutan (*Sustainability*)
5. Pemberdayaan (*Empowerment*)
6. Pribadi dan Politik (*The Personal and The Political*)
7. Kepemilikan komunitas (*Community ownership*)
8. Kemandirian (*Self Reliance*)
9. Ketidagtergantungan pada Pemerintah (*Independence from state*)
10. Tujuan dan Visi (*Immediate Goal and Ultimate Vision*)
11. Pembangunan bersifat organik (*Organik Development*)
12. Kecepatan Gerak Pembangunan (*the Pace of Development*)
13. Keahlian Pihak luar (*External Experties*)
14. Community Building (*Membangun Komunitas*)
15. Proses dan Hasilnya (*Process and Outcome*)
16. Keterpaduan Proses (*The integrity of the process*)
17. Tanpa Kekerasan (*Non –Violence*)
18. Inklusif (*Inclusiveness*)
19. Konsensus (*Consensus*)
20. Kerja sama (*Co- operation*)
21. Partisipasi (*Participation*)
22. Mendefinisikan Kebutuhan (*Defininf Need*)

Uraian dari masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut ;

1. **Pembangunan terpadu (*Integrated Development*)**. Dalam hal ini proses pengembangan masyarakat tidak berjalan parsial melainkan merupakan satu kesatuan proses pembangunan yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, lingkungan dan personal. Keenam aspek tersebut saling terkait satu sama lain.
2. **Konfrontasi dengan kebatilan structural (*Confronting Structural Disadvantage*)**. Prinsip ini berdasarkan pada prinsip keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat. Seorang petugas pengembangan (*commuity workers*) atau pendamping harus menyadari terdapatnya cara-cara yang menunjukkan tekanan pada suatu kelas, gender, suku bangsa berlangsung

kompleks. Pendamping harus kritis dan waspada memperhatikan kompleksitas yang dijumpai pada kelompok sasaran.

3. **Hak asasi manusia (*Human Rights*)**. Hak asasi manusia sangat penting untuk pekerja masyarakat. Program pengembangan masyarakat harus berdasar pada hakekat hak asasi manusia yang mencakup hak mendapatkan kehidupan layak, hak untuk ikut partisipasi dalam kehidupan sosial budaya serta hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, dan hak untuk pengambilan keputusan sendiri (*self-determination*).
4. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**. Sebagai bagian dari kerangka pembangunan berkelanjutan Program pengembangan masyarakat harus berusaha mengurangi ketergantungan pada sumberdaya yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*) dan menciptakan pilihan serta tatanan sosial, ekonomi, politik dan ekologis, yang berkelanjutan di tingkat lokal. Pengembangan masyarakat harus berusaha membatasi sekecil mungkin ketergantungan pada sumberdaya yang tidak dapat diperbarui dan menggantikannya dengan sumberdaya yang dapat diperbarui.
5. **Pemberdayaan (*Empowerment*)**. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan program pengembangan masyarakat. Seperti telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa makna pemberdayaan adalah ‘membantu’ masyarakat dengan sumberdaya, kesempatan, ketrampilan dan pengetahuan agar kemampuan masyarakat (komunitas) meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depannya.
6. **Pribadi dan Politik (*The Personal and The Political*)**. Pengembangan masyarakat perlu menciptakan hubungan antara aspek individu dan politik, individu dan struktur, masalah pribadi dan isu umum. Hubungan tersebut akan terwujud apabila keperluan pribadi, keinginan, problem, penderitaan, dan prestasi yang dialami dapat diekspresikan dalam wujud tindakan yang efektif dalam masyarakat yang pada akhirnya menjadi suatu kekuatan masyarakat.
7. **Kepemilikan komunitas (*Community ownership*)**. Kepemilikan menjadi aspek penting yang membantu mewujutkan identitas dan

menjadikan masyarakat lebih aktif dalam program-program pengembangan masyarakat.

8. **Kemandirian (*Self Reliance*)**. Prinsip ini mengimplikasikan agar warga masyarakat mencari atau berusaha menggunakan sumberdaya sendiri, baik teknik, keuangan, sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian merupakan prinsip kunci dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan prosen pembangunan berkelanjutan.
9. **Ketidagtergantungan pada Pemerintah (*Independence from state*)**. Prinsip ini berkaitan erat dengan kemandirian suatu komunitas. Pemerintah berperan sebagai sponsor. Dan respon pemerintah merupakan kebutuhan untuk mewujudkan dukungan pemerintah terhadap program pengembangan masyarakat. Peranan yang berlebihan dari pemerintah akan melemahkan kekuatan berbasis komunitas, oleh karenanya pendekatan berbasis komunitas harus mengurangi peranan pemerintah.
10. **Tujuan dan Visi (*Immediate Goal and Ultimate Vision*)**. Dalam pengembangan masyarakat perlu dipertahankan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan visi masyarakat.
11. **Pembangunan bersifat organik (*Organik Development*)**. Sesuai prinsip ini *Community workers* harus mampu menghargai dan menilai sikap tertentu warga komunitas, mengizinkan dan mendorongnya untuk berkembang sesuai karakteristik masing-masing. Komunitas lebih bersifat organik daripada mekanik. Komunitas bersifat kompleks dan dinamis, artinya pendekatan pengembangan masyarakat perlu menghargai tatanan dan nilai-nilai komunitas yang beragam sesuai dengan lingkuannya yang bersifat holistik.
12. **Kecepatan Gerak Pembangunan (*The Pace of Development*)**. Prinsip ini menekankan bahwa proses pembangunan dibiarkan berjalan alamiah apa adanya dan tidak dipercepat. Keberhasilan pengembangan masyarakat akan berlangsung pada dinamika komunitasnya. Keberhasilan *community workers* tergantung pada pengambilan keputusan dari langkah-langkah dan tindakan yang sesuai dengan proses dinamika masyarakat.



13. **Keahlian Pihak luar (*External Experties*)**. Keahlian dan pengalaman pihak luar boleh dipelajari sebagai pertimbangan dalam pembangunan wilayah, tetapi tidak ditiru secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan kondisi setempat (potensi, budaya dan tradisi setempat).
14. **Membangun Komunitas (*Community Building*)**. Prinsip ini diterapkan secara formal maupun informal. Hal ini menunjukkan lebih dari sekedar membawa orang-orang menjadi bersama, tetapi melibatkan proses mendorong orang untuk bekerjasama, lebih bergantung satu sama lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga program pengembangan masyarakat mencakup penguatan interaksi sosial di tingkat komunitas, mengajak kebersamaan, menerjemahkan melalui dialog, pemahaman, dan tindakan sosial.
15. **Proses dan Hasilnya (*Process and Outcome*)**. Dalam pengembangan masyarakat, proses dan hasil merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya penting, dan terpadu. *Community workers* harus selalu menghubungkan antara proses dan hasil serta sebaliknya.
16. **Keterpaduan Proses (*The integrity of the process*)**. Proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus sesuai dengan hasil yang diharapkan, perihal berkelanjutan, keadilan sosial dan lain-lain.
17. **Tanpa Kekerasan (*Non –Violence*)**. Pengembangan masyarakat dilaksanakan tanpa kekerasan struktural, yakni dengan cara tanpa mengubah lembaga yang ada dan struktur sosial masyarakat dan melalui proses tanpa kekerasan.
18. **Inklusif (*Inclusiveness*)**. Pinsip ini menekankan bahwa *community workers* tetap menghargai orang lain meski berbeda pandangan. Bekerja dalam suatu komunitas pada prinsipnya selalu “mengajak semua pihak” sehingga tidak menyisihkan mereka yang berbeda pendapat.
19. **Konsensus (*Consensus*)**. Prinsip ini tidak sekedar persetujuan untuk menerima pihak mayoritas, tetapi lebih jauh penerapannya agar orang-orang yang terlibat menyadari bahwa keputusan yang

diambil adalah yang terbaik dan keputusan yang diambil harus diterapkan sebisa mungkin.

20. **Kerjasama (*Co-operation*)**. Pendekatan pengembangan masyarakat yang berdasarkan konsensus dan tanpa kekerasan memerlukan struktur untuk bekerjasama (*co-operation*).dari pada struktur persaingan (*competition*)
21. **Partisipasi (*Participation*)**. Dalam pengembangan komunitas, harus mengoptimalkan partisipasi seluruh warga dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dan dalam proses implementasi serta evaluasi. Melalui peran serta semua warga komunitas maka dapat diperoleh proses belajar satu sama lain, mereka dapat merubah cara tradisional yang eksklusif menjadi kegiatan yang partisipatif dan secara sportif mereka menjadi tergantung satu sama lain.
22. **Mendefinisikan Kebutuhan (*Defining Need*)**. Proses pengidentifikasian kebutuhan merupakan tugas penting yang harus dilakukan *community workers*. Pendekatan harus mencari persetujuan dari berbagai macam kebutuhan. *Community workers* harus mampu membangun konsensus dari berbagai macam kebutuhan warga komunitas.

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pengembangan masyarakat merupakan pembangunan alternatif yang komperehensif dan berbasis masyarakat (komunitas).

### **C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Secara garis besar terdapat 6 (enam) tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. **Perbaikan kelembagaan (*better institution*)**. Dengan adanya perbaikan dalam kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaring kemitraan usaha. Perbaikan kelembagaan dapat mencakup aspek struktur maupun aspek tata nilai (kultur).
2. **Perbaikan usaha (*better business*)**. Perbaikan pendidikan, perbaikan akses bisnis, legalitas kegiatan dan perbaikan

kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang sedang dilakukan. Perbaikan usaha dapat mencakup perluasan usaha (peningkatan skala usaha) maupun penganeekaragaman (diversifikasi) usaha.

3. **Perbaikan pendapatan (*better income*)**. Dengan adanya perbaikan bisnis, diharapkan dapat memperbaiki penghasilan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. **Perbaikan lingkungan (*better environment*)**. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan, baik lingkungan fisik (alam) maupun lingkungan sosial. Karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas menjadi dapat menjadi penyebab kerusakan pada lingkungan
5. **Perbaikan kehidupan (*better living*)**. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan pola hidup setiap keluarga dan masyarakat.
6. **Perbaikan masyarakat (*better community*)**. Kehidupan yang membaik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

### **BAB III. PROSES DAN TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **A. Proses Pemberdayaan Masyarakat.**

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memberdayakan manusia melalui pengembangan manusia itu sendiri. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat-nya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* nilai guna (utilitas) dari obyek yang diberdayakan.

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, LSM berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Di sini, masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga menemukan solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri.

Sebagai suatu proses, pemberdayaan dapat dilihat dari perannya dalam menjalankan fungsi guna mencaai tujuan, yaitu :

1. Pemberdayaan sebagai proses perubahan
2. Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran
3. Pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas.
4. Pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial.
5. Pemberdayaan sebagai proses pembangunan masyarakat
6. Pemberdayaan sebagai proses pengembangan partisipasi masyarakat.

### **A.1.Pemberdayaan Sebagai Proses Perubahan**

Seiring dengan berjalannya waktu peradaban manusia berkembang terus, telah terjadi perubahan di seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat alami atau perubahan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan fisik maupun perubahan-lingkungan yang terjadi sebagai akibat tindakan manusia di dalam kehidupannya . Sebagai akibatnya kebutuhan manusia juga semakin berubah, baik dalam ragam, jumlah, dan bentuk-bentuk kebutuhannya.

Terkait dengan perubahan jaman seperti itu, setiap personal dan masyarakatnya harus bisa memilih; apakah menunggu munculnya perubahan yang bersifat alami dalam bentuk gerakan-gerakan alami menuju kepada keseimbangan dan keselarasan “baru”, atautkah secara aktif (menggunkan usahanya sendiri atau bersama dengan lingkungan sosialnya) melakukan usaha-usaha tertentu guna mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadinya di lingkungannya itu. Jika dipilih alternatif yang pertama, dengan relatif tidak atau sedikit melakukan pengorbanan sumberdaya, maka harus mau menghadapi resiko “ketinggalan jaman” sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sebaliknya, jika memilih alternatif kedua, mereka harus siap untuk bersaing dan memenangkan persaingan dengan sesamanya, yang pada hakekatnya juga senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan menikmati kehidupan yang serba kecukupan (baik fisik dan non fisik) untuk memperbaiki kesejahteraan.

Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai proses perubahan harus mampu untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan

yang terjadi di sekitarnya, setiap warga masyarakat (secara individual atau bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain) harus merancang kegiatan-kegiatan yang menuju kepada perubahan-perubahan yang lebih cepat dibanding perubahan yang berlangsung secara alami menuju kepada kondisi *keseimbangan baru* yang tidak alami tetapi berdasarkan upaya manusia melalui kegiatan-kegiatan “*pembangunan*” atau “*perubahan yang terencana*”.

Perubahan terencana, pada hakekatnya merupakan suatu proses yang dinamis, yang direncanakan oleh seseorang (secara individual atau yang tergabung dalam suatu lembaga-lembaga sosial). Artinya, perubahan tersebut memang menuntut dinamika masyarakat untuk mengantisipasi keadaan-keadaan di masa mendatang (yang diduga akan mengalami perubahan) melalui pengumpulan data (baik yang aktual maupun yang potensial) dan menganalisisnya, untuk kemudian merancang suatu tujuan-tujuan dan cara mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan di masa mendatang. Oleh sebab itu, perubahan terencana selalu menuntut adanya: perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Perubahan yang terencana itu hanya akan terjadi apabila dilakukan oleh pribadi orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai sikap, pengetahuan, dan ketrampilan tertentu yang bisa diandalkan, dan kerap kali juga membutuhkan kelembagaan tertentu. Oleh karenanya, perubahan terencana membutuhkan *pemberdayaan masyarakat* agar mau dan mampu melakukan perubahan (Harizi, 2007). Pemberdayaan sebagai proses perubahan, membutuhkan pembaharuan dalam bentuk gagasan, produk, metoda, peralatan atau teknologi. Praktek. Inovasi tersebut seringkali perlu berasal atau didatangkan dari luar. Namun demikian inovasi juga bisa diperoleh melalui penelitian, pengakuan atau pengembangan terhadap kebiasaan, nilai-nilai tradisi, kearifan lokal atau kearifan tradisional (*indigenous technology*). Di samping itu, pemberdayaan sebagai proses perubahan, mensyaratkan fasilitator yang kompeten dan memiliki integritas tinggi terhadap perbaikan mutu-hidup masyarakat yang akan difasilitasi. Fasilitator ini, dapat terdiri dari aparat pemerintah (PNS), aktivis LSM,

atau tokoh masyarakat/ warga setempat. Untuk itu, pemberdayaan juga memerlukan fasilitator yang akan berperan atau bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi, dan melakukan advokasi demi mewujudkan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Keberhasilan pemberdayaan sebagai proses perubahan mensyaratkan dukungan politik yang memberikan legitimasi terhadap gagasan dan proses perubahan. Oleh sebab itu, setiap upaya pemberdayaan tidak cukup hanya bertujuan untuk mengubah perilaku, dan meningkatkan pendapatan (*income generating*), tetapi harus selalu memiliki nilai politik dan nilai bisnis. Sebab, politisi memerlukan biaya perjuangan dan pelaku bisnis selalu memerlukan dukungan politik. Dalam hubungan ini, peran akademisi sangat diperlukan guna melakukan fungsi edukasi dan advokasi. Selain itu, peran media juga sangat diperlukan guna melakukan fungsi komunikasi dan diseminasi inovasi (Mardikanto, 2014).

## **A.2. Pemberdayaan Sebagai Proses Pembelajaran**

Menurut teori, perubahan terencana yang dilaksanakan melalui pemberdayaan, dapat dilakukan dengan melakukan: pemaksaan, ancaman, bujukan, atau pendidikan. Perubahan melalui pemaksaan atau ancaman, memang dapat terwujud dalam waktu yang relatif cepat sesuai dengan yang diharapkan. Namun perubahan seperti itu tidak bertahan lama. Jika kekuatan pemaksaan mengendor, maka keadaan yang sudah berlangsung akan terhenti dan kembali seperti semula.. Perubahan yang dilakukan melalui bujukan atau pemberian insentif tertentu, juga dapat berlangsung cepat secepat pemaksaan atau ancaman. Tetapi, perubahan yang terjadi melalui bujukan dalam waktu panjang justru akan menciptakan ketergantungan, karena bujukan atau pemberian insentif akan mematikan keswadayaan masyarakat. Sebaliknya, perubahan melalui proses pendidikan atau proses belajar, seringkali berlangsung lambat, namun perubahan yang terjadi akan berlangsung mantab dan langgeng. Oleh karenanya, pemberdayaan harus dirancang sebagai proses belajar, yaitu proses



yang didalamnya harus terkandung upaya-upaya pembelajaran atau penyelenggaraan pelatihan, dan lain-lain.

Proses belajar dalam pemberdayaan bukan proses ‘menggurui’ melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif (Mead, 1959). Sehingga keberhasilan pemberdayaan bukan diukur dari seberapa jauh terjadi transfer pengetahuan, ketrampilan atau perubahan perilaku; tetapi seberapa jauh terjadi dialog, diskusi, dan pertukaran pengalaman (*sharing*). Karena itu, antara fasilitator dan peserta sebagai penerima manfaat dalam kedudukan yang setara yang saling membutuhkan dan saling menghormati. Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran, harus mengacu kepada kebutuhan masyarakat, untuk memngoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat serta diusahakan guna sebesar-besar kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

### **A.3.Pemberdayaan sebagai Proses Penguatan kapasitas.**

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi-tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Penguatan kapasitas diartikan sebagai penguatan kemampuan yang ada pada masing-masing personal (dalam komunitasnya), tata nilai/kelembagaan, maupun sistem atau keterkaitan antar personal dan kelompok/organisasi sosial, serta pihak lain di lingkungan diluar masyarakatnya baik lokal, nasional hingga internasional. Pengertian tersebut, berisi pemahaman bahwa:

- (1) Pengertian kapasitas adalah kemampuan (individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain) untuk menunjukkan/memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- (2) Kapasitas merupakan proses yang dinamis, dan juga proses yang berkelanjutan.
- (3) Pengembangan kemampuan sumberdaya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas.
- (4) Pengertian kelembagaan, mencakup pengertian dalam arti sempit (kelompok, perkumpulan atau organisasi), serta dalam arti luas,



berkaitan dengan aspek perilaku, sistim nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Kekuatan atau daya dan potensi yang dipunyai setiap individu dan komunitas bersifat dinamis dan aktif bisa berubah yaitu terus menerus dikembangkan/dikuatkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih memberikan bermanfaat. Penguatan masyarakat dalam hal ini mempunyai makna-ganda yang bersifat timbal-balik. Di satu pihak, penguatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan individu yang lebih mampu berperan di dalam kelompok dan komunitas global, di tengah-tengah ancaman yang menghadang baik dalam kehidupan pribadi, kelompok dan komunitas global.

Sebaliknya, penguatan masyarakat diarahkan untuk melihat peluang yang berkembang di lingkungan kelompok dan masyarakat global agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan individu, kelompok, dan komunitas global (UNDP, 1998)

Pengembangan kapasitas individu, adalah segala upaya untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik di dalam entitasnya maupun dalam lingkup global. Pengembangan kapasitas pribadi, meliputi: pengembangan kemampuan kepribadian, kemampuan di bidang pekerjaan, serta pengembangan keahlian keprofesionalan.

Berbeda dengan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas/organisasi lebih ditekankan kepada pengembangan mutu entitas/organisasi. Menurut Mardikanto (2010), kapasitas entitas/organisasi tersebut, meliputi:

- (1) Keragaan visi, misi, dan budaya organisasi
- (2) Kejelasan susunan organisasi, kemampuan, dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan/efektivitas organisasi
- (3) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengendalian.
- (4) Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya yang mencakup: sumberdaya manusia, sumberdaya financial, sumberdaya informasi, maupun sarana dan prasarana.

- (5) Interaksi antar individu di dalam organisasi
- (6) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

Selain pengembangan kapasitas organisasi, perlu dikembangkan kapasitas jejaring antar pemangku kepentingan, yang meliputi :

- (1) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama
- (2) Interaksi dengan entitas/orgnisasi di luar system

#### **A.4. Pemberdayaan sebagai Proses Perubahan Sosial**

Pemberdayaan tidak terbatas hanya sebagai proses perubahan perilaku pada diri individu, namun juga merupakan proses *perubahan sosial*, yang meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya ekonomi dan politik, yang dalam waktu lama (jangka panjang) secara berurutan bisa diandalkan mewujudkan alternatif-alternatif baru guna memperbaiki kehidupan komunitasnya (Mardikanto (2010)). Konsep perubahan sosial dalam hal ini dimaksudkan adalah keseluruhan dinamika perubahan pada masyarakat, yang mencakup perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu, dan juga dinamika perubahan pola interaksi antar individu dalam masyarakat, yang meliputi struktur, nilai-nilai, norma dan tatanan sosialnya, seperti: demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, dan lain-lain.

Sejalan pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial tersebut, pemberdayaan juga dimaknai sebagai proses rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam hal ini dimaksudkan adalah segala usaha yang dilaksanakan guna menyiapkan sumberdaya manusia sehingga mereka tahu, mau dan mampu melakukan perannya sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosial masyarakatnya.

Rekayasa sosial dilakukan oleh pihak luar, bertujuan untuk terjadinya proses perubahan sosial agar terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh perekayasa. Pemaknaan seperti itu adakalanya tidak sepenuhnya bisa diterima semua pihak. Hal ini karena rekayasa sosial yang prinsipnya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kelompok sasaran, adakalanya dapat berakibat negatif,

jika hanya berdasarkan kepada kepentingan perekayasa, sedangkan masyarakat dijadikan sasaran pemenuhan keinginan perekayasa (Mardikanto, 2010).

Dalam proses perubahan sosial, juga dikenal istilah pemasaran sosial (*social marketing*), yakni penggunaan teori-teori dan atau konsep pemasaran dalam proses perubahan sosial. Pemasaran sosial berbeda dengan rekayasa sosial. Rekayasa-sosial lebih berkonotasi untuk “membentuk” (*to do to*) atau menjadikan masyarakat menjadi hal yang “baru” sesuai yang keinginan perekayasa. Sementara Proses Pemasaran Sosial dimaksudkan untuk “menawarkan” (*to do for*) sesuatu kepada masyarakat. Selain itu dalam rekayasa-sosial proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di pihak perekayasa, sedangkan pengambilan keputusan dalam pemasaran-sosial sepenuhnya berada di pihak masyarakat itu sendiri.

#### **A.5. Pemberdayaan sebagai Proses Pembangunan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan masyarakat ada kalanya sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*), yaitu proses dimana upaya-upaya individu disatukan dengan upaya-upaya pemerintah guna memperbaiki kondisi soial, ekonomi, dan budaya masyarakat, menyatupadukan masyarakat tersebut kedalam kehidupan bangsa, dan memberikan peluang kepada masyarakat itu berkontribusi secara penuh untuk kemajuan nasional (Slamet, 1992, dalam Mardikanto 2010). Seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada pengertian yang sama. Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat semakin kiat dan menyeluruh.. Hal ini sebagai wujud suatu perubahan sosial yakni masyarakat menjadi lebih kompleks, kelembagaan lokal tumbuh, *collective powernya* meningkat dan selanjutnya terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Meskipun belum ada kesepakatan dan pengertian yang baku tentang pemberdayaan masyarakat atau yang secara umum juga dikenal dengan *community empowerment*, nampaknya cukup penting

dan berguna untuk mengadopsi pengertian pemberdayaan masyarakat yang dirilis oleh Tim Deliveri (2004) sebagai salah satu acuan, yaitu:

*Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.*

Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*).

Pemberdayaan masyarakat berkaian erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat *top-down* perlu direorientasikan mengarah pada pendekatan *bottom-up* yang menempatkan komunitas atau petani di pedesaan sebagai obyek pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan "*put the farmers first*". Hal pokok dalam suatu program pemberdayaan masyarakat yaitu bahwa program yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mendukung kepesertaan masyarakat miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibentuk dari sumberdaya lokal, peka terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menyebabkan ketergantungan, semua pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta berkelanjutan. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting.

Sesuai dengan visi *Community Empowerment for Rural Development* (CERD) yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri, pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi

masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan (CERD, 2004).

#### **A.6. Pemberdayaan Sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat**

Pengertian istilah *partisipasi* adalah, keikut-sertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Dawam Raharjo, 1983). Beal (1964:241) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Sebagai suatu kegiatan, Verhagen (1979: 1) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Lebih lanjut, analisis tentang “modal sosial” (*social capital*) terhadap arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menunjukkan bahwa (Wolcook dan Narayan, 2000) partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan *sinergi* dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun *sinergi* dalam “jaringan komunitas” (*community network*).

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung

jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka.

Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

Hal ini antara lain disebabkan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, seringkali memberi konsekuensi yang berupa berkurangnya “perbedaan status” dan hilangnya hak-hak istimewa (*privillage*) yang biasanya dinikmati oleh kelompok “elite” tertentu. Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh “pemerintah” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan indikasi adanya pengakuan (aparatus) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekadar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Di samping itu, penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali juga terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” (Geertz dalam Herman Soewardi, 1976). Padahal, menurut White (1978), persepsi seperti itu sebenarnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak memahami keadaan masyarakat. Di lain pihak, kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat, juga dapat disebabkan karena mereka sudah terlalu lama *direkayasa untuk tidak perlu berpikir* oleh pihak penguasa. Sehingga mereka lebih suka menerima apapun yang harus dilakukan/diinstruksikan, dibanding harus ikut susah-susah berpikir, merencanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan.



Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor penentu tumbuh dan berkembangnya partisipasi tersebut, maka upaya penumbuh dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa penelitian (kajian) tentang partisipasi dalam program pemberdayaan ini antarlain kajian tentang partisipasi masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Palembang (Sriati, et al, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : (1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kotaku termasuk katagori sedang skor 29,2 (capaian 64,89%). (2) Efektifitas Program Kotaku termasuk katagori sedang dengan skor 19,73 (capaian 64,44 %), dan (3) terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi dengan efektifitas Program Kotaku di Kelurahan Pipa Reja, dengan nilai Korelasi Peringkat Spearman ( $R_s$ ) = 0,476 dengan  $\alpha$  =0.01.

Kajian serupa tentang Partisipasi wanita dalam Program Industri Rumahan (Sriati, et al 2018). Program Industri Rumahan (IR) merupakan suatu Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif yang dikerjakan dirumah oleh perempuan wirausaha. Industri Rumahan adalah suatu usaha skala mikro dan umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang member nilai tambah dan dikerjakan di rumah secara khusus maupun sebagai kerja paruh waktu. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Industri Rumahan (IR) di Kota Palembang, (2) mengukur efektivitas Program Industri Rumahan (IR) di Kota Palembang dan (3) menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan efektifitas Program Industri Rumahan (IR) di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program IR termasuk katagori sedang skor 24,2 (capaian 62,05%). (2) Efektifitas proram di Kelurahan 27 Ilir dan 30 Ilir termasuk criteria sedang , masing-masing dengan skor 10,84 (capaian 72,3 % ) dan ,69 (capaian 71,27%). (3) Karakteristik individu yang berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi, adalah tingkat pendidikan ( $R_s$  = -0,435\*\*)

dan Kelurahan 30 Ilir karakteristik individu yang berhubungan dengan partisipasi adalah : modal ( $r_s=0,500$ , taraf nyata 0,01), dan pendapatan ( $r_s=0,382$ , taraf nyata 0,05). Hubungan antara tingkat partisipasi dengan efektifitas Program Industri Rumahan tidak signifikan.

Dari dua kajian tersebut tampak bahwa umumnya partisipasi masyarakat dalam program-program pemberdayaan masih belum maksimal. Umumnya partisipasi mereka dalam katagori sedang. Ini merupakan tantangan bagi pekerja penyuluhan (pendamping) untuk mencari strategi dan solusi agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dalam arti: (Mardikanto , 2010)

- a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
- b) Menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi
- c) Menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi
- d) Menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

## **B. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu, bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai proses perubanan berencana, maka dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada tahapan-tahapan dalam perubahan berencana tersebut.

Dalam kaitannya dengan perubahan terencana (*Planned Change*), Lippit (1961) menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) tahapan utama kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu : (1) penyadaran, (2) menunjukkan adanya masalah, (3) membantu pemecahan masalah, (4) menunjukkan pentingnya perubahan (5) melaku-kan pengujian dan demonstrasi, (6) memproduksi dan



publikasi informasi, dan (7) melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas. Uraian setiap tahapan tersebut secara rinci sebagai berikut :

- (1) *Penyadaran*, yaitu aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan guna menyadarkan masyarakat terkait “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai perorangan dan anggota masyarakat, maupun keadaan lingkungannya yang mencakup lingkungan fisik/teknis, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Proses penyadaran semacam ini dimaksudkan oleh Freire (1976) sebagai tugas pokok dari masing-masing kegiatan pendidikan, tercakup di dalamnya pemberdayaan.
- (2) *Menunjukkan terdapatnya masalah*, yakni keadaan yang tidak dikehendaki, yang mencakup : keadaan sumberdaya (manusia, alam, sarana-prasarana, budaya, kelembagaan, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya dan politis. Usaha menunjukkan masalah juga mencakup faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
- (3) *Membantu menyelesaikan masalah*, mulai analisis akar-masalah, analisis alternatif penyelesaian masalah, serta pilihan alternatif penyelesaian masalah terbaik yang bisa dilaksanakan sesuai dengan keadaan internal (kekuatan, kelemahan) ataupun keadaan eksternal (peluang dan ancaman) yang ada.
- (4) *Menunjukkan pentingnya perubahan*, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional dan global). Mengingat kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”. Diharapkan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada.
- (5) *Melakukan verifikasi dan demonstrasi*, sebagai bagian dari penerapan perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Aktivitas uji-coba dan demonstrasi ini sangat dibutuhkan, karena tidak semua inovasi selalu sesuai (secara: teknis, sosial, ekonomis, budaya, dan politik/kebijakan) dengan keadaan komunitasnya.

Selain itu, uji coba juga dibutuhkan guna mendapatkan gambaran mengenai berbagai alternatif yang paling berguna dengan resiko atau korbanan sekecil mungkin.

- (6). *Menghasilkan dan publikasi informasi*, baik yang berasal dari luar (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dan lain-lain) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indege-nuous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Selaras dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat pemberdayaannya
- (7). *Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas*, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroot*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, akuntabilitas publik, dan penguatan kapasitas lokal.

Dalam praktek (penerapannya) tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat umumnya disesuaikan dengan jenis program atau kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Sebagai contoh, Tim Delivery (2004) menerapkan tahapan-tahapan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat yang mencakup 4 (empat) tahap utama, yaitu : (1) tahap seleksi lokasi, (2) tahap sosialisasi pemberdayaan, (3) tahap proses pemberdayaan, dan (4) tahap pemandirian masyarakat. Selanjutnya tahap utama tersebut dirinci dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- (1) Tahap 1. Seleksi lokasi
- (2) Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat
- (3) Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat:
  - a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif
  - b) Pengembangan kelompok
  - c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
  - d) Monitoring dan evaluasi partisipatif
- (4) Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

### ***1. Seleksi Lokasi/Wilayah***

Seleksi wilayah dilaksanakan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, lembaga, dan komunitasnya. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

### ***2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat***

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan diperoleh tingkat pemahaman yang tinggi baik masyarakat sasaran dan pihak yang terlibat, tentang program maupun aktivitas pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

### ***3. Proses Pemberdayaan Masyarakat***

Hakekat pemberdayaan masyarakat ialah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- (1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa kedaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi:
  - (a) persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan-awal dan teknis pelaksanaannya,
  - (b) persiapan penyelenggaraan pertemuan
  - (c) pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan
  - (d) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut
- (2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:

- (a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
  - (b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
  - (c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
  - (d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya
- (3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

- (4) **Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus** secara partisipatif (*participatory monitoring and ecaluation/PME*) PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya.

PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik *prosesnya* (pelaksanaan) maupun *hasil* dan *dampaknya* agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

#### **4. Pemandirian Masyarakat**

Berdasar dari prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memandirikan masyarakatnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah melalui pendampingan guna menyiapkan masyarakat untuk benar-benar dapat mengelola sendiri kegiatannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, sekalipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu bentuk *selforganizing* dari masyarakat, tetapi juga perlu mmencurahkan perhatian pada faktor eksternalnya.

Proses pemberdayaan masyarakat seyogyanya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping

ini sebagai salah satu *external factor* dalam proses pemberdayaan masyarakat. Peran pendamping pada awal kegiatan sangat aktif namun akan menurun secara bertahap selama kegiatan berlangsung hingga masyarakat sudah bisa melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam hal ini, contoh yang telah diterapkan, antara lain adalah Program Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dilaksanakan Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 tahap (tahun). Tahun pertama (tahap pemula) bantuan berupa Dana 150 juta dan pendampingan, pada Tahun ke dua, bantuan dana 75 juta dan pendampingan, dan pada tahun ke tiga hanya pendampingan saja. Diharapkan dengan adanya tahapan tersebut akan tercipta kemandirian.

Hal tersebut sejalan dengan Mardikanto (2010) yang menyatakan dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dilakukan oleh pengurus kelompok atau orang lain yang dipandang cakap oleh masyarakat. Kesepakatan warga bersama akan menentukan kapan saat yang tepat untuk pemunduran tim fasilitator. Mengacu kepada beberapa pengalaman menunjukkan bahwa Tim Fasilitator bisa dilaksanakan sedikitnya 3 tahun setelah kegiatan dimulai dengan tahap sosialisasi. Sekalipun tim sudah mundur, para anggota tetap berperan, yakni sebagai peminat atau tempat bertanya (konsultan) bila dibutuhkan oleh masyarakat.

Sejalan dengan tahapan-tahapan proses pemberdayaan seperti telah disebutkan terdahulu, tahapan proses pemberdayaan bisa dikelompokkan menjadi beberapa tahapan, yaitu (Mardikanto, 2010) :

(1) *Penetapan dan pengenalan wilayah kerja*

Sebelum melakukan kegiatan, penetapan wilayah kerja perlu memperoleh kesepakatan antara Tim Fasilitator, Aparat pemerintah setempat, perwakilan masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan yang lain (pelaku bisnis, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi, dan lain-lain). Hal ini, dimaksudkan untuk menghindari gesekan atau konflik kepentingan antar semua pemangku kepentingan, tetapi juga untuk membangun sinergi dan memperoleh dukungan berupa



partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, demi keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.

- (2) *Sosialisasi Kegiatan*, yaitu upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Termasuk dalam sosialisasi kegiatan, perlu juga dikemukakan tentang pihak-pihak terkait yang akan diminta partisipasi/keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan, strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan
- (3) *Penyadaran masyarakat* yang seperti uraian di atas, merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan guna menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik sebagai perorangan dan anggota masyarakat, ataupun keadaan lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Termasuk dalam penyadaran, adalah
  - a) Bersama-sama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi dan masalah, serta analisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
  - b) Melakukan analisis akar masalah, analisis pilihan pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilaksanakan
  - c) Menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya, termasuk merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, cara melakukan dan mencapai perubahan, sumberdaya yang diperlukan, maupun peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, kelembagaan, dan lain-lain) yang diperlukan.
- (4) *Pengorganisasian masyarakat*, termasuk pemilihan pemimpin dan kelompok-kelompok tugas (*task group*) yang akan dibentuk. Pengorganisasian masyarakat ini penting dilakukan, karena untuk melaksanakan perubahan guna memecahkan masalah dan atau memperbaiki keadaan seringkali tidak dapat dilakukan secara individual (perorangan), tetapi memerlukan pengorganisasian

masyarakat. Termasuk dalam pengorganisasian adalah: pembagian peran, dan pengembangan jejaring kemitraan

(5) *Pelaksanaan kegiatan* yang terdiri dari:

- a) Berbagai pelatihan untuk menambah dan atau memperbaiki pengetahuan teknis, ketrampilan manajerial serta perubahan sikap/wawasan
- b) Pengembangan kegiatan, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan (*income generating*) serta perlindungan, pelestarian dan perbaikan/ rehabilitasi sumberdaya alam, maupun pengembangan efektivitas kelembagaan. Kegiatan peningkatan pendapatan merupakan upaya terpenting untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan maupun untuk meningkatkan posisi tawar dan membangun kemandirian. Peningkatan pendapatan, juga memiliki arti penting agar masyarakat semakin yakin bahwa peran-bantuan yang diberikan benar-benar mampu memperbaiki kehidupan mereka, minimal secara ekonomi.

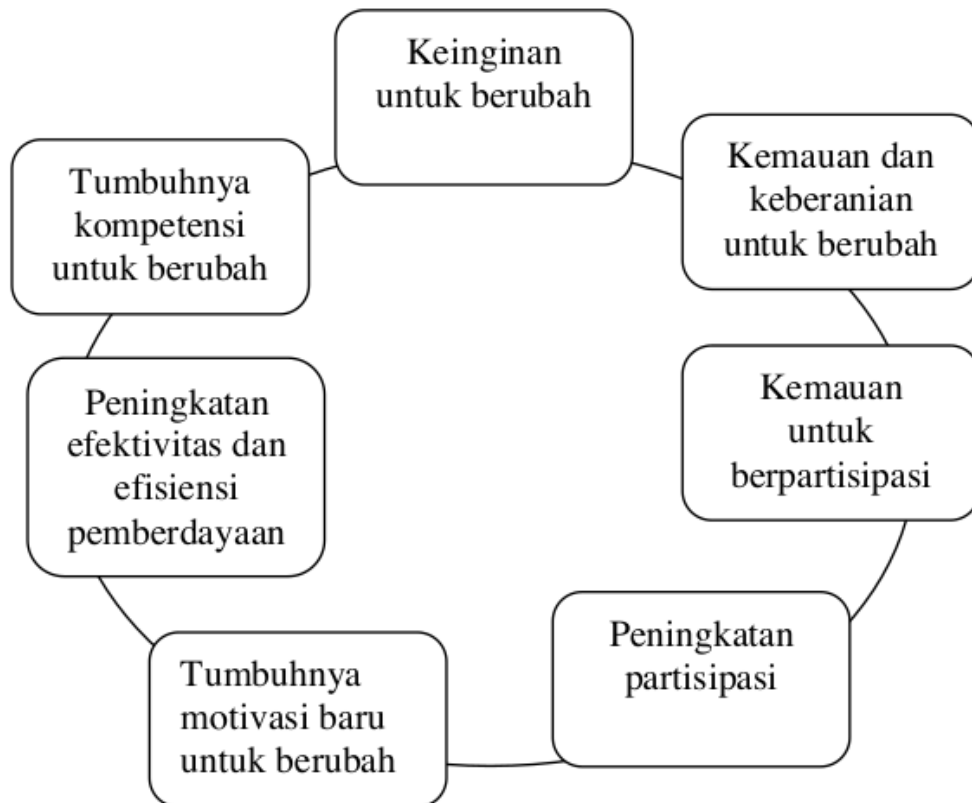
(6) *Advokasi Kebijakan*, karena semua upaya pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan, penguatan posisi tawar, dan lain-lain) memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kegiatan advokasi ini diperlukan guna memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat (aparatur pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, pegiat LSM, akademisi, dan lain-lain).

(7) *Politisasi*, dalam arti terus menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dan melestarikan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk kader perubahan, promosi melalui media masa, aksi nyata melalui kelompok kecil yang menunjukkan manfaat pemberdayaan.

Ditinjau dari sisi individu sebagai sasaran pemberdayaan, maka kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu

organisasi mencakup tujuh tahapan, yang merupakan suatu siklus. Tahapan tersebut digambarkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Siklus Tahapan Pemberdayaan Masyarakat (Sumaryadi, 2004).

Deskripsi ke tujuh tahapan tersebut sebagai berikut :

1. **Menumbuhkan keinginan** pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;
2. **Menumbuhkan kemauan dan keberanian** untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti



pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;

3. **Mengembangkan kemauan untuk mengikuti** atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;
4. **Peningkatan peran atau partisipasi** dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;
5. **Peningkatan peran dan kesetiaan** pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;
6. **Peningkatan efektivitas dan efisiensi** kegiatan pemberdayaan;
7. **Peningkatan kompetensi** untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Ditinjau dari pemberdayaan sebagai program pembangunan, Soekanto (1987) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai 7 (tujuh) tahapan atau langkah yang harus dilakukan. Tahapan tersebut adalah :

1. **Tahap persiapan.** Pada tahap ini ada dua tahapan, yaitu (a) penyiapan petugas yakni tenaga pemberdayaan masyarakat, dan (b) penyiapan lapangan.
2. **Tahap pengkajian (*assesment*).** Pada tahapan proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Petugas harus berusaha mengidenti kebutuhan yang dirasakan (*feel need*) dan juga sumberdaya yang dimiliki sasaran.
3. **Tahap penentuan alternatif program atau kegiatan.** Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Diharapkan masyarakat dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. **Tahap pemformalisasi rencana aksi.** Pada tahap ini agen perubahan membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Petugas

juga membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila terkait dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5. **Tahap pelaksanaan (implementasi)** program atau kegiatan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Dalam tahap ini diharapkan kerjasama yang baik antara petugas dan masyarakat.
6. **Tahap Evaluasi.** Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan melibatkan warga. Dengan melibatkan warga diharapkan dalam waktu singkat dapat terbentuk sistem komunikasi untuk pengawasan internal dan untuk jangka panjang membangun komunikasi masyarakat yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.
7. **Tahap terminasi.** Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pada tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Berdasarkan uraian tentang proses dan tahapan pemberdayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan dapat dirumuskan berdasarkan tahapan kegiatan program (bentuk fisik kegiatan) dan juga tahapan yang terjadi pada individu sasaran program (yang berupa proses yang dialami sasaran). Tahapan-tahapan tersebut harus dipahami semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan (pelaksana program, kelompok sasaran, dan *stakeholder* lainnya), agar program pemberdayaan dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Pemahaman tentang proses dan tahapan pemberdayaan tersebut juga menjadi dasar (bahan pertimbangan) dalam menentukan strategi pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Bahasan tentang Ruang Lingkup dan Strategi Pemberdayaan diuraikan pada Bab IV berikut.



## **BAB IV. RUANG LINGKUP DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN**

### **A. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat**

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemberdayaan merupakan upaya peningkatan dan atau optimasi daya (yang ada dan atau dapat digunakan oleh masyarakat). Dalam pengertian ini daya mencakup “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi tawar”. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara kontinyu, komprehensif dan simultan hingga batas tercapainya keseimbangan dinamis antara pemerintah dan yang diperintah (sasaran). Menurut Ndraha, ruang lingkup program pemberdayaan yang diperlukan mencakup 4 aspek, yaitu :

1. **Pemberdayaan politik**, yang dimaksudkan untuk meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. Bargaining ini ditujukan agar yang diperintah mendapatkan haknya dalam wujud barang, jasa layanan, serta kepedulian yang tidak merugikan pihak lain. Disebutkan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang mempunyai “*quality of work life*” yang tinggi dan berorientasi kepada : (a) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (b) program pengembangan karir, (c) gaya kepemimpinan, (d) derajat tekanan yang dialami pekerja, dan (e) budaya organisasi.
2. **Pemberdayaan ekonomi**, diarahkan sebagai usaha meningkatkan kapasitas yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berperan sebagai penanggung dari akibat negatif pertumbuhan pembayar resiko salah urus, kegagalan program, pemikul beban pembangunan, serta akibat kerusakan lingkungan.
3. **Pemberdayaan sosial budaya**, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) serta perlakuan yang adil terhadap manusia.
4. **Pemberdayaan lingkungan**, ditujukan sebagai program pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah

dan lingkungan dapat beradaptasi dengan baik serta saling menguntungkan.

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*). Terkait hal ini, Sumadyo (2001) dikutip Mardikanto (2010) mengemukakan tiga usaha utama dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Terkait rumusan ini, Mardikanto (2010) mengungkapkan bahwa Ketiga Bina tersebut (Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan) dapat terwujud, apabila didukung dengan efektifitas berbagai kelembagaan yang dibutuhkan. Penjelasan ruang lingkup pemberdayaan yang mencakup 4 aspek tersebut sebagai berikut:

### **1. Bina Manusia**

Bina Manusia, merupakan usaha pertama dan utama yang harus diperhatikan ketika melakukan pemberdayaan masyarakat. Keadaan ini didasarkan oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk peningkatan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Selain itu dalam ilmu manajemen, manusia merupakan unsur yang paling istimewa, karena selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri.

Tercakup dalam usaha Bina Manusia, adalah semua aktivitas yang termasuk dalam usaha penguatan/pengembangan kemampuan yaitu :

- (1) *Pengembangan kapasitas perorangan* yang mencakup kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan
- (2) *Pengembangan Kapasitas Entitas/Kelembagaan*, yang meliputi:
  - a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi

- b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi
  - c) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi
  - d) Pengembangan kuantitas dan kualitas sumberdaya
  - e) Interaksi antar individu di dalam organisasi
  - f) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain.
- (3) *Pengembangan Kapasitas Sistem (Jejaring)*, yang terdiri :
- a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama
  - b) Pengembangan Interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem

## **2. Bina Usaha**

Bina Usaha menjadi sebuah usaha utama dalam setiap pemberdayaan, sebab, Bina Usaha yang tidak memberikan dampak atau kegunaan bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau non ekonomi) tidak diterima dan bahkan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Sementara, Bina usaha yang dapat dengan segera dan tepat memberikan dampak atau nilai guna bagi peningkatan kesejahteraan (ekonomi dan atau non ekonomi) akan diterima masyarakat dan mendapat dukungan yang berupa kepesertaan (partisipas) masyarakat. Bina Usaha mencakup:

1. Pemilihan komoditas dan jenis usaha
2. Studi Kelayakan dan Perencanaan Bisnis
3. Pembentukan Badan usaha
4. Perencanaan Investasi dan Penetapan sumber-sumber pembiayaan
5. Pengelolaan SDM dan pengembangan karir
6. Manajemen Produksi dan Operasi
7. Manajemen Logistik dan Finansial
8. Penelitian dan pengembangan
9. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Bisnis
10. Pengembangan jejaring dan kemitraan
11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung

### **3. Bina Lingkungan**

Isu lingkungan menjadi sangat penting sejak dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolabel, dan lain-lain. Hal ini dinilai penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (terutama yang terkait dengan tersedianya bahan-baku).

Selama ini, pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekadar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Namun dalam kenyataannya perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Kesadaran itu mendorong diterbitkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang di dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh penanam modal/perseroan.

Di lingkungan internasional, sejak 2007 telah ditetapkan ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Termasuk dalam tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja), maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/perseroan. Sedangkan yang termasuk Tanggung jawab Lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### **4. Bina Kelembagaan**

Keberadaan dan efektivitas kelembagaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan, acapkali dimaknai

dalam arti sempit sebagai berbagai wujud lembaga (kelompok, organisasi). Namun demikian, kelembagaan hakekatnya mempunyai makna yang lebih luas. Hayami dan Kikuchi (1981) memaknai kelembagaan merupakan perangkat umum yang dipatuhi oleh anggota masyarakat (komunitas) tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata “*institution*” adalah satu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi.

Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial. Apapun itu, pada dasarnya, suatu wujud relasi-sosial dapat dikatakan sebagai sebuah kelembagaan bila mempunyai empat komponen, yaitu adanya:

- (1) *Komponen person*, yakni personal yang terlibat dalam satu kelembagaan bisa diidentifikasi dengan jelas.
- (2) *Komponen kepentingan*, yakni personal yang terlibat sedang disatukan oleh satu keperluan atau tujuan bersama, sehingga diantara mereka mau tidak mau harus saling berinteraksi.
- (3) *Komponen aturan*, yakni masing-masing kelembagaan membuat sejumlah kesepakatan yang dipegang secara bersama, agar personal bisa memprediksi perilaku individu lain dalam lembaga tersebut.
- (4) *Komponen struktur*, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Dari beragam pengertian yang diberikan, kelembagaan memiliki cirri-ciri:

1. Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen, karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan.
2. Kelembagaan, berkaitan dengan hal-hal abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks dari beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sepadan (*selevel*).



Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan *public mind*, atau “wujud ideal kebudayaan”

3. Kelembagaan menyangkut perilaku, atau sejumlah tata kelakuan (*mores*), atau pola bertindak yang permanen yang berlangsung di komunitas (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola menjadi keteraturan hidup.
4. Kelembagaan juga memfokuskan kepada pola tingkahlaku yang disepakati dan mempunyai sanksi.
5. Kelembagaan merupakan metode atau cara yang baku guna menyelesaikan masalah. Fokusnya adalah pada kemampuannya untuk menyelesaikan masalah.

Sehubungan dengan Bina Kelembagaan, dalam kegiatan agribisnis, misalnya, diperlukan beragam kelembagaan. Mosher (1969) menyatakan bahwa untuk membangun struktur perdesaan yang progresif dibutuhkan kelembagaan-kelembagaan: (1) sarana produksi dan peralatan pertanian, (2) kredit produksi, (3) pemasaran produksi, (4) percobaan/ pengujian lokal, (5) pemberdayaan, dan (6) transportasi. Keenam jenis kelembagaan tersebut, harus tersedia di setiap lokalitas usaha tani dan memiliki keterkaitannya dengan lembaga sejenis di tingkat nasional seperti tampak pada Gambar 4 (Mosher, 1983).



Lebih lanjut, Syahyuti (2007) menyebutkan pentingnya 8 (delapan) kelembagaan dalam pengembangan agribisnis, yaitu :

- (1) kelembagaan penyediaan input usahatani,
- (2) kelembagaan penyediaan permodalan,
- (3) kelembagaan pemenuhan tenaga kerja,
- (4) kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi,
- (5) kelembagaan usahatani,
- (6) kelembagaan pengolahan hasil pertanian,
- (7) kelembagaan pemasaran hasil pertanian, dan
- (8) kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dan lain-lain).

Seperti telah dikemukakan, dalam praktek kegiatan pemberdayaan seringkali terfokus pada upaya perbaikan pendapatan (*income generating*). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi belum cukup. Karena hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan *kemandiriannya* demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan.

### **B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.**

Pemberdayaan masyarakat telah didefinisikan sebagai suatu proses, gerakan sosial, dan suatu program, suatu kegiatan. Setiap definisi tersebut dapat menempatkan batas-batas tertentu pada target perencanaan untuk pengembangan masyarakat. Oleh karenanya perlu pembahasan tentang strategi pemberdayaan masyarakat dalam berbagai pendekatan, sejalan dengan definisi-definisi tersebut.

Chin dan Benne (1961) dalam Nasdian (2014), tanpa spesifik menunjuk pada pengembangan masyarakat, memperkenalkan tiga strategi bagi perubahan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Strategi tersebut adalah : (1) *rational-empirical*, *normative-reeducative*, dan (3) *power-coercive*, bergantung pada asumsi –asumsi

yang terkait dengan sifat alami manusia, hubungan kekuasaan, dan sikap dan sistem nilai warna komunitas.

Selanjutnya Hikmat (2006) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) strategi utama pemberdayaan masyarakat, yaitu : tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi . Secara terinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Korten (A. Priyatna) menyebutkan bahwa strategi program pemberdayaan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang tergambar dalam empat generasi, yaitu :

1. Generasi yang mengutamakan *relief and welfare*, yang ditujukan secepat mungkin bisa mencukupi kekurangan atau memenuhi kebutuhan tertentu yang ada pada individu dan atau keluarga seperti keperluan kesehatan, kebutuhan makanan, dan pendidikan.
2. Generasi yang memusatkan keinginannya pada *small-scale reliant local development* atau disebut dengan *community development*, pada segmen ini antara lain meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini penyelesaian persoalan masyarakat bawah (*grassroot*) tidak dapat diselesaikan hanya dengan metode *top down approach* akan tetapi membutuhkan metode pendekatan *bottom up approach*.

3. Generasi yang mana semua potensi dan sumberdaya manusia yang tersedia harus berperansertat dalam *sustainable sistem development*, yakni mulai memperhitungkan dampak pembangunan dan cenderung mempeluas pandangan ke wilayah lain, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Pada fase ini ada usaha untuk ikut menentukan perumusan kebijakan pembangunan. Strategi ini menghendaki adanya perubahan pada tingkat regional dan nasional.
4. Generasi yang berfungsi sebagai fasilitator gerakan masyarakat (*people movement*). Peran generasi ini adalah memfasilitasi agar masyarakat dapat megorganisasikan dan menemukanli kebutuhan setempat, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada. Selain berperan mempengaruhi perumusan kebijakan, generasi ini juga menghendaki terjadinya perubahan dalam implementasinya.

Ismawan dalam Priyono (.....) mengemukakan terdapat 5 (lima) strategi pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, yakni: (1) program pemberdayaan sumberdaya manusia, (2) program pengembangan kelembagaan lokal, (3) program pemupukan modal swasta, program pengembangan usaha produktif, dan (5) program penyediaan informasi tepat guna.

Menurut Rothman (1970) dalam Nasdian (2014) disebutkan bahwa terdapat tiga klasifikasi utama pengembangan masyarakat, yaitu: (1) pembangunan lokalitas (*locality development*), (2) perencanaan sosial (*social planning*), dan (3) aksi sosial (*social action*). Dijelaskan pula bahwa ada kemungkinan munculnya pendekatan lain sebagai suatu hasil mutasi dari ketiga pendekatan atau strategi tersebut.

## **BAB V. PERANAN PEKERJA PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

Dalam proses pengembangan masyarakat, pekerja pengembangan masyarakat mempunyai beberapa peranan. Pada suatu dimensi waktu, pekerja pengembangan masyarakat dapat berperan sebagai *enabler* atau *organizer* atau *educator*. Peranan ini bergerak dari yang satu ke lainnya, sehingga pekerja pengembangan masyarakat berperan ganda, dan lebih sebagai seorang yang generalis. Namun demikian, peranan seorang pengembang masyarakat dapat dikategorikan dalam 4 peranan, yaitu (Nasdian, 2014):

1. **Fasilitator (*Facilitative Roles*)**. Sebagai seorang fasilitator tugas pekerja pengembang masyarakat adalah :
  - a. Membantu anggota komunitas agar mereka berpartisipasi dalam pembangunan, dengan memberikan inspirasi, semangat, rangsangan, inisiatif, energi, dan motivasi sehingga mampu bertindak.
  - b. Mampu mendengar dan memahami aspirasi anggota komunitas, bersikap netral, mampu mencari jalan keluar, dan mampu bernegosiasi.
  - c. Mampu memberikan dukungan kepada orang yang terlibat.
  - d. Mampu membantu anggota untuk mencari konsensus
  - e. Orang yang mampu memberikan fasilitas
  - f. Mampu memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada.
2. **Pendidik (*Educational Roles*)**. Sebagai pendidik, pekerja pengembangan masyarakat harus berusaha menumbuhkan kesadaran, menyampaikan informasi pada anggota komunitas, menciptakan konfrontasi antar kelompok-kelompok agar dinamis, dan memberikan pelatihan berdasarkan topik yang sesuai dengan kebutuhan anggota.
3. **Utusan dan wakil (*Representational Roles*)**. Peran ini berkaitan dengan interaksi pekerja pengembangan masyarakat dengan lembaga-lembaga eksternal yang memberi keuntungan pada komunitas melalui : pencarian sumberdaya, advokasi, penggunaan

media, hubungan masyarakat, jaringan antar pekerja pengembangan, dan sharing pengalaman baik secara formal maupun informal.

4. **Teknikal (*Technical Roles*)**. Pekerja Pengembangan Masyarakat, harus mampu melakukan *need assesment*, misalnya penggunaan beragam metode penelitian, penggunaan komputer, kemampuan menyampaikan informasi.

Berdasarkan berbagai peranan pekerja pengembangan masyarakat tersebut dapat dirumuskan ketrampilan inti yang harus dimiliki oleh pekerja pengembangan masyarakat, yaitu :

1. Berkomunikasi Interpersonal
2. Mendinamiskan Kelompok
3. Mendidik Komunitas
4. Mengakses sumberdaya
5. Mengatasi konflik
6. Merepresentasi dan advokasi
7. Menyampaikan sesuatu di depan publik
8. Menguasai media
9. Menggali dan membagi pengalaman
10. Merumuskan gagasan
11. Mengelola kegiatan
12. Melakukan penelitian

Keterampilan seseorang tidak dapat hanya dipelajari dari buku saja. Pengalaman di lapangan sangat menentukan keterampilan seseorang pekerja pengembangan masyarakat menjalankan tugasnya. Guru yang baik adalah yang mampu membantu pekerja pengembangan masyarakat di lapangan mengembangkan ketrampilan dengan simulasi dan masukan timbal balik, lingkungan belajar yang kondusif, ruang refleksi kritis, dan mengajarkan keterampilan dengan cara yang sama dengan mengajarkan keterampilan teknik. Nasdian (2014) menyebutkan bahwa terdapat sepuluh peran pekerja pengembangan masyarakat di lapangan, yaitu:

1. "Langkah untuk menyatu" dengan yang miskin dalam komunitas mereka.



2. Melaksanakan pengkajian Sosial (*Social inquiry*), yaitu sebuah proses yang sistematis untuk mencari masalah-masalah disekeliling komunitas yang diorganisir.
3. Merumuskan program awal bersama komunitas.
4. Menciptakan landasan kerja. berdasarkan hubungan warga komunitas untuk melakukan Landasan kerja berarti berjalan berkeliling dan menggerakkan komunikasi terhadap persoalan.
5. Memfasilitasi musyawarah. Pada musyawarah komunitas mengesahkan secara bersama-sama apa yang sudah mereka putuskan.
6. Membangun simulasi dalam bentuk “bermain peran”. Bermain peran berarti memainkan suatu musyawarah yang mungkin terjadi antara pimpinan komunitas dengan wakil pemerintah.
7. Membangun aktivitas bersama warga komunitas dalam bentuk aksi komunitas.
8. Pekerja komunitas di lapangan melakukan penilaian bersama atau evaluasi.
9. Kemampuan merefleksikan peran pertama sampai dengan ke tujuh,
10. Pengorganisasi warga komunitas. Organisasi komunitas hasil dari banyak aksi komunitas yang bersamaan.

Ada beberapa ciri (karakteristik) organisasi komunitas yang oleh Komite Asia untuk Pengorganisasian komunitas (ACPO) diupayakan untuk dikembangkan :

1. Merupakan organisasi dari berbagai organisasi kecil
2. Mempunyai struktur internal untuk membantu komunitas berpartisipasi
3. Pada setiap saat dapat menghadapi banyak persoalan.
4. Merupakan aksi yang tetap. Aksi merupakan darah kehidupan komunitas.
5. Bersungguh-sungguh. Muncul untuk selalu menang.
6. Memilih teknik yang efektif.
7. Jelas dan penuh pertentangan.
8. Memberikan gambaran tentang suatu kekuatan.
9. Pemimpin baru senantiasa muncul.

10. Pemimpin dan komunitas berpikir dan bertindak dalam pengertian keinginan sendiri, taktik kekuasaan dan lain-lain.
11. Aliansi atau persatuan partisan politik harus dibuat dengan penuh pertimbangan.
12. Dana harus bisa digalang dari komunitas, dan
13. Menciptakan dampak melampaui keprihatinan dan lingkungan yang ada.

## BAB VI. PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### A. Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Secara etimologi, kata partisipasi berasal dari Bahasa Inggris *participation* yang berarti keikutsertaan atau mengambil bagian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi didefinisikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan individu atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Secara konseptual pengertian partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan di masyarakat diluar pekerjaan atau profesinya (Theodorson dalam Mardikanto 1993). Dengan kata lain partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan umum.

Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai dampak adanya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Dawam Raharjo, 1983). Beal (1964) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menumbuhkan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melakukan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Beberapa definisi lain tentang partisipasi diantaranya : Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk kegiatan khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut adalah karena kesadaran yang dipunyai seseorang tentang : (a) kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, (b) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan masyarakatnya, (c) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, dan (d) adanya kepercayaan diri bahwa dirinya dapat memberikan manfaat bagi kegiatan yang bersangkutan (Totok Mardikanto dan Poerwoko, 2012).

Beberapa batasan (definisi) partisipasi telah dirumuskan beberapa ahli, diantaranya Bhattacharya (1972) menyebutkan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Mubyarto (1984) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Kemudian Bryant dan White (1982) menyebutkan adanya partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal, sementara Davis (1967) menggolongkan partisipasi kelompok dan partisipasi individual.

#### **B. Bentuk (tahap) Partisipasi:**

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial (Rogers, 1969; Staud, 1979)
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentatati, memenuhi, melaksanakannya), mengiyakan menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya (Evelyn Wood, dalam Kurushetra 1962).
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana, Hofsteede, 1971)
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan (cohen dan Uphoff, 1977)

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan (Cohen dan Uphoff menamakan "*participation in benefit*")
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan (Mosha dan Matte, Cohen dan Uphoff), yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **C. Cara menggerakkan partisipasi:**

Terdapat beberapa cara untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Melalui perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat (Poston, 1962)
2. Melalui proyek pembangunan desa yang sederhana dan mudah dikelola masyarakat
3. Organisasi dan kelembagaan masyarakat yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan (Bryant dan White, 1982)

Dalam proses pemberdayaan (pembangunan) partisipasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu partisipasi sebagai masukan dan partisipasi sebagai luaran.

**Sebagai masukan** dapat berfungsi dalam enam fase proses, yaitu : fase penerimaan informasi, pemberian tanggapan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan, dan fase penilaian hasil pembangunan. Sebagai masukan partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

**Sebagai keluaran**, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya, misal Lomba Desa, KUD dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Hal ini berarti melalui partisipasi yang diberikan, individu atau masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, melainkan juga menuntut adanya peran serta masyarakat yang akan diperbaiki kesejahteraaannya.

Pemberdayaan, pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) nya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Sekalipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang penting ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam prakteknya, banyak menemui kendala. Hal ini antara lain disebabkan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, seringkali memberi konsekuensi yang berupa berkurangnya “perbedaan status” dan hilangnya hak-hak istimewa (*privilege*) yang biasanya dinikmati oleh kelompok “elite” tertentu.

Sementara, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh “pemerintah” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan indikasi adanya pengakuan (aparatus) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekadar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Tujuan pengembangan partisipasi menurut Juliantara (Purnamasari, 2008) adalah :

1. Partisipasi akan memungkinkan masyarakat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri sehingga rakyat mampu



- menghadapi situasi sulit dan mampu menolak kecenderungan yang merugikan.
2. Partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi harus menjadi jaminan tidak terabaikannya kepentingan masyarakat.
  3. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

#### **D. Lingkup Partisipasi dalam Pembangunan.**

Dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Hal ini berarti melalui partisipasi yang diberikan, individu atau masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, melainkan juga menuntut adanya peran serta masyarakat yang akan diperbaiki kesejahteraannya.

Pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (pembangunan partisipatoris) merupakan suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik mungkin. Dalam hal meningkatkan keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka perlu diupayakan stimulus yang umumnya didahului oleh pihak lain misalnya pemerintah, LSM dan pihak lainnya yang peduli pada pemberdayaan masyarakat.

Jika partisipasi dimaknai sebagai suatu cara/proses interaksi antara negara dan warganya yang saling menguntungkan, maka partisipasi mempunyai dua unsur penting yaitu keterwakilan dan keterlibatan. Kedua unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi satu sama lain.

Seperti telah disebutkan pada uraian terdahulu, bahwa partisipasi mengandung suatu tujuan, maka Oakley et.al dalam Ife dan Frank (2016) memperlihatkan perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan partisipasi sebagai tujuan seperti pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1. Perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan sebagai tujuan.

<b>Partisipasi sebagai cara</b>	<b>Partisipasi sebagai tujuan</b>
Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya	Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti
Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumberdaya yang untuk mencapai tujuan program atau proyek	Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan
Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktivitas partisipasi itu sendiri	Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Lebih umum dalam program-program pemerintah yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian.	Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini.
Partisipasi umumnya jangka pendek	Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang
Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi.	Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.

Sumber : Jim Ife (2014).

Terdapat empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu : (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan,

(3) partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi, dan (4) partisipasi dalam penggunaan hasil-hasil pembangunan (Mardikanto dan Purwoko, 2015). Disebutkan pula bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu : (1) terdapatnya peluang yang diberikan kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi, (2) adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan (3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Terdapatnya peluang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk berperanserta adalah faktor utama pendorong tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di tingkat komunitas memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam *stakeholders* lainnya. Oleh karena itu semua stakeholder sebagai pelaku perubahan dalam proses pembangunan berupaya memberdayakan warga komunitas (dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya) baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok-kelompok sosial, ataupun komunitas guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Selama ini peran serta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, partisipasi masyarakat hanya dilihat pada "implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil "pihak luar". Hal ini dikritik, dan konsep yang baru bahwa partisipasi yang diharapkan adalah yang aktif dan kreatif, seperti yang diungkapkan Paul (1987) sebagai berikut :

*...participation refers to active process whereby beneficiaries influence direction and execution of development project rather than merely receiver a share of project benefits.*

Pengertian tersebut melihat partisipasi masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi (Cohen dan Uphoff, 1980).

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali juga terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang

menilai masyarakat “*sulit diajak maju*” (Geertz dalam Herman Soewardi, 1976). Padahal, menurut White (1978), persepsi seperti itu sebenarnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak memahami keadaan masyarakat. Di lain pihak, kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga dapat disebabkan karena mereka sudah terlalu lama *direkayasa untuk tidak perlu berpikir* oleh pihak penguasa. Sehingga mereka lebih enggan menerima apapun yang harus dilakukan/diinstruksikan, dibanding harus ikut susah-susah berpikir, merencanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan.

Bertolak dari telaahan tentang faktor-faktor penentu tumbuh dan berkembangnya partisipasi di atas, maka upaya penumbuh dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam prakteknya dilakukan melalui kegiatan komunikasi pembangunan.

Tentang hal ini, harus dipahami bahwa, tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekadar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian informasi pembangunan saja, melainkan ada yang lebih utama dari itu yaitu : menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dalam arti:

- a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
- b) Menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi
- c) Menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi
- d) Menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

Dusseldorp (1981:34) bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok

3. Melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lainnya
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
5. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Sejalan dengan tujuannya yaitu memberdayakan masyarakat secara optimal, maka Sherry Arnstein (1996) mengembangkan 8 (delapan) anak tangga partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang dibagi dalam 3 tingkatan yaitu : (1) tingkatan tidak berpartisipasi, (2) tingkatan *tokenism*, dan (3) tingkat kekuatan masyarakat. Masing-masing tingkatan terdiri dari anak tangga dan penjelasnya sebagai berikut.

#### **1. Tingkat tidak berpartisipasi.**

Pada tingkatan tidak berpartisipasi terdiri dari 2 anak tangga yakni (a) manipulasi, dan (b) terapi. Pada tingkat manipulasi, Pemerintah berusaha mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat masyarakat tanpa disadari agar mendukung kegiatan pemerintah. Pada tingkat terapi, pemerintah melakukan terapi untuk mengobati kekecewaan masyarakat dengan mendengarkan keluhan dan menjamin bahwa kesalahan yang telah terjadi tidak akan terulang lagi.

#### **2. Tingkatan *Tokenism***

Pada tingkat ini masyarakat hanya diminta untuk memberikan informasi mengenai suatu keputusan namun mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Dengan kata lain, pada tahap ini masyarakat mendengarkan dan didengarkan suaranya oleh pemerintah, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan untuk memastikan suaranya didengar, karena kekuatan pengambilan keputusan masih di tangan pemerintah. Pada tahap *tokenism* ini ada 3 anak tangga, yaitu : (a) pemberian informasi, (b) konsultasi, dan (c) *placation*. Pada



tahap pemberian informasi pemerintah memberikan penjelasan tentang hak, tanggungjawab, pilihan atau hal lainnya kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah. Masyarakat tidak diminta memberikan pendapat atau informasi. Pada tahap konsultasi, Pemerintah hanya menggunakan data atau informasi tentang jumlah masyarakat yang hadir dan telah mengisi kuesioner untuk membuktikan bahwa masyarakat telah berpartisipasi. Pemerintah tidak dapat menjamin apa yang dilakukan masyarakat dalam partisipasi tersebut akan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahap placation, Pemerintah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada masyarakat secara terbatas untuk memberikan masukan yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, Pemerintah menentukan masyarakat yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan masih tetap ditangan pemerintah (Arnstein, 1969;220).

### **3. Tingkat Kekuatan Masyarakat**

Pada tingkat ini, masyarakat menjadi salah satu aktor utama yang dapat memberikan kekuatan pada suatu kegiatan. Pada tingkatan ini terdapat 3 anak tangga, yaitu (a) kemitraan, (b) pendelegasian wewenang, dan (c) kontrol masyarakat. Pada tingkat kemitraan Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat. Pemerintah memberikan kewenangan pada masyarakat melalui mekanisme negosiasi dan persetujuan kedua belah pihak. Kewenangan tersebut mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan. Pada tahap pendelegasian wewenang, terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah dan masyarakat, yang mana masyarakat mempunyai kewenangan yang lebih besar daripada Pemerintah. Selanjutnya pada tingkat kontrol masyarakat, kewenangan masyarakat dalam mengambil keputusan lebih besar, sehingga masyarakat berpartisipasi. Masyarakat dapat melakukan pengelolaan kegiatan dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban. Partisipasi masyarakat yang ideal menurut Arnstein (1969) adalah ketika berada pada

tingkat kekuatan masyarakat. Pada tingkat ini kekuatan masyarakat benar-benar diberdayakan untuk mendukung kegiatan Pemerintah.





## **BAB VII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMISKINAN**

### **A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan konsep mengaktualisasikan potensi yang sebenarnya telah dimiliki oleh individu dalam masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengambil perannya sebagai individu, bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Pendekatan yang dipakai dalam pemberdayaan masyarakat memiliki maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas untuk mampu mempengaruhi perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) ialah usaha untuk mengembangkan daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi dan menumbuhkan kesadaran terhadap potensi yang dipunyainya serta berusaha untuk mengembangkan. Kata “berdaya” dalam Kamus Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976:215) diartikan sebagai : (1) berkemampuan; bertenaga, (2) mempunyai akal, cara untuk mengatasi sesuatu. United Nations (1956:83-92), menyebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Getting to know the local community*. Mengetahui ciri-ciri masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa/kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan yang berkaitan dengan informasi tentang komunitas setempat. Pengetahuan dimaksud adalah informasi faktual tentang sebaran penduduk berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, , tingkat, pekerjaan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, budaya, sikap, ritual dan kebiasaan, jenis pengelompokkan, serta leadership baik formal maupun informal.
3. *Identifying the local leaders.* Agar berhasil, maka usaha pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Oleh karenanya faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
4. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Didalam masyarakat yang terikat dengan adat kebiasaan, adakalanya masyarakat tidak menyadari bahwa mereka mempunyai permasalahan yang perlu dipecahkan. Oleh karena, perlu dilakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar mereka tahu dan sadar bahwa mereka memiliki masalah yang perlu diselesaikan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
5. *Helping people to discuss their problem.* Pemberdayaan masyarakat harus mampu memotivasi masyarakat untuk membicarakan dan mendiskusikan masalahnya dan merumuskan pcaranya penyelesaiannya dalam suasana kebersamaan.
6. *Helping people to identify their most pressing problems.* Tujuan Pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah terwujudnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri yaitu masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan atau kapasitasn masyarakat untuk berswadaya.

#### **B. Konsep Kemiskinan (definisi, jenis, ukuran/indikator)**

Istilah miskin atau kemiskinan diartikan sebagai ketiadaan harta atau ketidakberdayaan yang membuat seorang tak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya (Ismail (2007)). Kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya

selaras dengan tingkat kehidupan kelompok dan juga tidak bisa memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2012). Menurut Suparlan dalam Masykuri (2007), kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak berpengaruh terhadap kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi: (1) Modal produktif atas asset misalnya, peralatan, tanah perumahan, dan kesehatan. (2) Sumber keuangan, seperti income (pendapatan) dan kredit yang memadai. (3) Organisasi sosial dan politik yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama, seperti koperasi. (4) *Network* atau jaringan sosial untuk mendapatkan pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. (5) Sumber pengetahuan dan berita yang bermanfaat bagi kehidupan.

Menurut Suyanto (2013), pengertian tentang kemiskinan secara garis besar bisa di bedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

**Kemiskinan relatif**, dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan provinsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. **Kemiskinan absolut** diartikan sebagai sesuatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Asumsi nyata tersebut dinyatakan secara kuantitatif atau dalam uang berdasarkan harga pada tahun pangkal tertentu.

Kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas

kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2004:4). Mengacu pada kriteria kemiskinan yang diajukan oleh United Nations Development Program (UNPD), US \$1 per hari per kepala adalah batasan miskin dan tidak miskin. Maksudnya bila seseorang berpenghasilan kurang dari US \$1 per hari maka dia dapat dikategorikan dalam kriteria miskin ([unpd.org.mdg.basics](http://unpd.org.mdg.basics)).

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Lain halnya dengan kriteria yang disusun UNPD, walaupun pertimbangan yang mendasarinya sama, Badan Pusat Statistik Indonesia memberikan kriteria kemiskinan dengan satuan rumah tangga sebagai basis pengukuran. Terdapat 13 kriteria rumah tangga miskin yang dirumuskan BPS adalah sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>
2. Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air terlindungi / sungai /air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;

8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik;
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
13. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, perak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Menurut Usman (2010), kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta hidupnya serba kekurangan. Dari beberapa pendapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakberdayaan atau ketidakmampuan masyarakat baik dalam bentuk individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan tempat mereka lahir bertumbuh, dalam banyak hal, lebih mudah dihadapi daripada kebudayaan baru yang perlu penyesuaian bahkan mungkin mengkhawatirkan. Ciri pokok “kondisi membiasanya penderitaan” dalam suatu lingkungan adalah bahwa kondisi tersebut sangat sulit disadari oleh orang-orang yang hidup didalamnya. Dengan demikian, apa yang tampak dari luar sebagai kondisi hidup yang mengerikan, oleh orang-orang yang berada didalam, dilihat sebagai realitas hidup harian yang tidak menutup kemungkinan bagi berkembangnya rasa senang atau kepuasan. (Taylor, 2007) Kemiskinan yang digambarkan oleh Taylor, menunjukkan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menyadari kemiskinan yang dialaminya sebagai suatu masalah. Sekalipun mereka memandang kemiskinan sebagai suatu masalah miskin yang menimpa dirinya. Kondisi membiasanya penderitaan dan perangkat kemiskinan sebagaimana digambarkan Taylor utamanya dapat dilihat pada kelompok-kelompok yang secara turun temurun selalu berada dalam stratifikasi sosial

paling bawah. Kelompok masyarakat seperti ini cenderung menerima kemiskinan sebagai nasib. Mereka tidak menangkap peluang dalam perkembangan dan pembangunan disekitarnya, bahkan seringkali enggan atau takut untuk memulai sesuatu yang baru. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau dialihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Kemiskinan dalam kondisi struktur demikian tidak disebabkan oleh faktor-faktor yang alami atau faktor-faktor pribadi dari orang miskin itu sendiri melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak masyarakat gagal untuk mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya maupun untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. (Suyanto dalam BPS 2008) Michel Mollat dalam Muller (2006) menyebutkan bahwa Orang miskin adalah mereka yang tetap atau sementara dalam keadaan lemah, tergantung dan remeh, dalam keadaan kekurangan yang berbeda-beda menurut zaman dan pola masyarakat serta dalam keadaan tak berdaya dan terhina. Orang miskin tidak memiliki uang, koneksi, pengaruh, kuasa, pengetahuan, keterampilan teknis, kelahiran yang terhormat, kekuatan fisik, kemampuan intelektual, dan kebebasan pribadi bahkan harkat manusia. Mereka hidup dari hari ke hari dan tidak punya peluang sedikit pun untuk melepaskan diri dari keadaannya tanpa bantuan orang lain ataupun pemerintah. Definisi semacam ini meliputi semua orang yang tersingkirkan dan dicabut hak-haknya, semua orang aneh dan semua kelompok marginal. Dalam konteks inilah pemberdayaan sangat diperlukan. Pemberdayaan harus mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, harus mampu mendorong masyarakat untuk menyadari permasalahan yang dihadapinya, meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, memberikan peluang dan akses sumberdaya untuk memperbaiki kehidupannya. Untuk itu perlu keterlibatan berbagai pihak. Dalam konteks pembangunan, dalam bab terdahulu telah disebutkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Salah satu wujud upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini adalah melalui program-program pemberdayaan.

### **a. Penyebab Kemiskinan.**

Suyanto (2013), menyebutkan faktor penyebab kemiskinan, dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural (buatan). **Kemiskinan alamiah**, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, bukan ada kelompok atau individu dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan miskin alamiah tersebut akan terdapat perbedaan kekayaan-kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patron klien (orang yang memperoleh layanan), jiwa gotong royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial. **Kedua, kemiskinan buatan**, yaitu kemiskinan yang timbul karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian, sebagai anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaanya sehingga, mereka yang termasuk kedalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Itulah orang yang tidak mau berusaha dan mencari jalan keluar dari permasalahan kehidupannya. Kemiskinan yang timbul akibat kondisi lingkungan, diri rumah tangga baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Bukan hanya itu, hubungan sosial juga sangat mempengaruhi perubahan pola hidup masyarakat untuk selalu hidup berkelompok.



## **b. Penanggulangan Kemiskinan**

Suyatna (2013), secara konseptual perlu disadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak dilakukan secara sepotong-sepotong, parsial dan hanya bersifat temporer. Dengan mengacu pada sejumlah isu prioritas kemiskinan yang dihadapi di atas, maka program-program intervensi yang dikembangkan harus benar-benar komprehensif, tidak berhenti hanya pada aspek ekonomi kemiskinan saja, tetapi juga perlu menyentuh perbaikan pada aspek kerentanan, ketidak berdayaan, kelemahan jasmani dan keterisolasian. Sebab keberdayaan bukan berarti miskin tidak memiliki harta saja, tetapi keberdayaan dari kelemahan-kelemahan lainnya.

## **c. Indikator Kemiskinan .**

Beberapa indikator-indikator kemiskinan yang dijabarkan oleh BAPPENAS (2001), dipertegas dengan rumusan konkrit sebagai berikut ini:

- (1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan rendah hanya mengkonsumsi 1.571 Kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah.
- (2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.
- (3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, dan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

- (4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.
- (5) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
- (6) Terbatasnya akses air bersih, kesulitan untuk memperoleh air bersih terutama dikarenakan oleh keterbatasan penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.
- (7) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidak pastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian, dan kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah serta kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian.
- (8) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan.
- (9) Lemahnya jaminan rasa aman. Hal ini terkait dengan aspek keamanan, misalnya aman dari bencana, aman dari kejahatan, aman dari wabah, terhindar dari daerah konflik dan sejenisnya. Kelemahan jaminan rasa aman merupakan indikasi adanya kemiskinan. Kasus pengungsi dan migrasi penduduk merupakan salah satu indikasi adanya salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan.
- (10) Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus pengusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja dengan sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

- (11) Besarnya beban kependudukan yang diakibatkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan terdapatnya tekanan hidup yang mendukung terjadinya migrasi. (BPS, 2004). Jumlah tanggungan keluarga merupakan pembagi dari pendapatan per kapita, makin besar jumlah tanggungan keluarga makin kecil pendapatan per kapita, dan hal ini berarti kemiskinan makin besar.

#### 1. Tingkat Pendidikan yang Masih Rendah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Dalam konteks ini penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itulah, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini.

#### 2. Masih Terbatasnya Lapangan Pekerjaan

Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal.

#### 3. Malas Bekerja.

Hal ini yang paling sering menjangkiti seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-

hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang.

#### 4. Beban Hidup Keluarga.

Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya.

#### 5. Keterbatasan Sumber Daya (Alam maupun Modal)

Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing masing orang. Bisa saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur maupun kondisi psikologis orang-orang yang terdampak mengalami kerusakan. Kadang memang hal tersebut akan dapat diatasi dan kadang bahkan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi kerusakan tersebut biasanya juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, dari bencana alam, banyak orang-orang yang kehilangan harta bendanya, sehingga langsung jatuh miskin setelah itu.

Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang. Apalagi untuk orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tidak hanya modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal keterampilan atau pengetahuan. Hal ini menjadi penyebab kemiskinan yang juga cukup serius.

#### **d. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.**

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang (10,14 persen), naik dibanding Maret 2020

yang sebesar 26,42 juta orang (9,78 persen). Selama periode Maret 2020-Maret 2021, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 1,01 juta orang, sementara di daerah perdesaan bertambah 0,11 juta orang. Pemerintah melakukan berbagai strategi untuk penurunan kemiskinan.

Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan diupayakan melalui: peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

**e. Program-program Pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan.**

Kemiskinan masih menjadi masalah serius hampir di setiap negara termasuk Indonesia. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, yang kemudian akan mendasari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Sarana untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memperkecil disparitas masyarakat, adalah bantuan sosial. Namun, efektivitas belanja sosial harus ditunjang dengan program pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri. Jelaslah disini bahwa program-program pemberdayaan dapat mengurangi kemiskinan. Beberapa program pemberdayaan untuk pengurangan kemiskinan antara lain sebagai berikut.

1. **Program Keluarga Harapan (PKH)** dilakukan dengan pendampingan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS). Tujuannya, agar para pendamping keluarga penerima manfaat (KPM) memastikan bansos yang diterima dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan

anak-anak, dan tambahan modal usaha ekonomi produktif. Salah satu program pemberdayaan ekonomi bagi penerima bansos PKH antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH. Program itu bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

2. **Program P2KP (program penanggulangan kemiskinan di perkotaan).** Bentuk P2KP antara lain berupa pendamping dan dukungan modal untuk usaha yang diterima kelompok marginal di kawasan kota. Sekelompok masyarakat penerima bantuan dana penanggulangan kemiskinan dengan pendampingan yang tepat dapat merintis usaha baru atau bekerja di sektor informal dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program Penganggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangkaian Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan bakar minyak. P2KP awal pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2004. P2KP mengacu pada program bank dunia, dimana criteria kemiskinan disini mempunyai keunikan tersendiri yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Program ini diterapkan dengan harapan dapat tercipta kelembagaan masyarakat yang secara generic disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui penggalan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan antara lain; dapat dipercayai, ikhlas/kerelawaan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan dalam keragaman, demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi. BKM yang dikembangkan dan diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam meyuarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

3. **Program-program lainnya untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan spesifikasi yang lebih**



**fleksibel**, antara lain: Program dana pendidikan BOS (bantuan operasional sekolah), Program Raskin (beras untuk masyarakat miskin), Program pos pelayanan keluarga berencana dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir bagi kelompok-kelompok nelayan. Program Raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin) merupakan usaha pemerintah dalam rangka program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, salah satunya adalah beras untuk masyarakat miskin (raskin).

Program Keluarga Harapan Dalam rangka percepatan upaya penganggulangan kemiskinan, pemerintah mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini pada dasarnya memberikan bantuan tunai untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dan melakukan pemeriksaan kesehatan serta pemberian makanan bergizi kepada anak-anak usia balita dan ibu hamil/menyusui. Dalam jangka pendek, bantuan ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Sementara dalam jangka waktu panjang, diharapkan melalui peningkatan pendidikan serta perbaikan kondisi kesehatan dan gizi, dapat memutus rantai kemiskinan. Kemiskinan suatu keluarga sangat terikat dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan nutrisi. Pembangunan selama ini yang lebih ditujukan pada sisi *supply* atau pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan belum memberikan dampak yang efektif terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya masyarakat miskin. Rendahnya tingkat pendidikan sebuah rumah tangga miskin menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Keluarga ini pun tidak mampu menjaga kesehatan ibu mengandung sehingga mengakibatkan tingginya resiko kematian ibu saat melahirkan dan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan. Anak-anak keluarga miskin juga banyak yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena putus harus bekerja membantu mencari nafkah. Program ini diharapkan akan berdampak pada pola perubahan pola pikir masyarakat miskin untuk memiliki generasi penerus yang lebih berkualitas dan



mandiri. Dan juga program ini diharapkan dapat mengurangi kasus pekerja anak. tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita serta meningkatkan pendidikan anak - anak usia sekolah hingga tama sekolah dasar. Dan yang menjadi sasaran program ini adalah ibu-ibu pada usia subur, ibu hamil atau menyusui, anak-anak balita, serta anak - anak usia sekolah dasar dan menengah pertama, terutama yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin.

Pada dasarnya program-program pemberdayaan untuk menanggulangi kemiskinan ini dilaksanakan sesuai dengan dinamika permasalahan yang dihadapi masyarakat /negara. Sebagai contoh dimasa pandemi Covid 19 tingkat kemiskinan meningkat. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang meningkat akibat pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, dan fokus memperluas jaringan perlindungan sosial yang menysasar kelompok terbawah. Berbagai program bantuan sosial telah digulirkan, diantaranya Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Hasil Susenas Maret 2021 juga menunjukkan semakin rendah kelompok quintil pengeluaran, semakin banyak rumah tangga yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), BPNT, PIP, dan PKH. Pada masa Pandemi covid-19. Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Penyaluran diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan Data Kementerian Dalam Negeri. Bantuan sosial yang diberikan merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan pemerintah yang mencakup tiga jenis program yaitu Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

Penjelasan Beberapa istilah tersebut sebagai berikut :

**a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**, merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS berfungsi sebagai media penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini juga dapat merekam data penerima dan tabungan elektronik (e-wallet). Kartu KKS juga sudah digunakan oleh sebagian penerima PKH untuk memanfaatkan bantuan melalui ATM atau Agen Bank ditunjuk dan penerima Bantuan Pangan untuk mengambil bantuannya di e-warong. Semakin Tinggi Kelompok Quintil Pengeluaran Semakin Rendah Persentase Rumah Tangga Penerima KKS.

Berdasarkan distribusi rumah tangga penerima KKS, semakin tinggi kelompok quintil pengeluaran semakin rendah persentase rumah tangga penerima KKS. Rumah tangga pada kelompok 20 persen terbawah (Q1) memiliki persentase yang paling tinggi sebagai penerima KKS yaitu sebesar 21,92 persen, sedangkan pada rumah tangga kelompok 20 persen teratas (Q5) ternyata juga masih ada rumah tangga yang menerima program ini yaitu sebesar 4,05 persen.

**b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako** Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan dalam bentuk e-voucher yang disalurkan melalui Bank Himbara. E-voucher ini digunakan untuk membeli bahan pangan yang mengandung sumber karbohidrat seperti beras dan sumber protein seperti telur dan daging ayam di e-warong terdekat. KPM bebas memilih bahan pangan tersebut. Pada tahun 2021, sebagai dampak pandemi covid-19 yang belum berakhir, terdapat 18,8 juta KPM yang akan menerima BPNT/Program Sembako. Setiap KPM akan menerima bantuan setiap bulan sebesar Rp 200.000,-. Besaran bantuan yang diterima mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya berkisar Rp150.000,-. Sebagian Besar Penerima BPNT/Program Sembako adalah Kelompok Menengah ke Bawah (D1 -D5).

Analisis data Susenas Maret 2021 menunjukkan bahwa rumah tangga penerima BPNT/Program Sembako pada tahun 2021, terlihat bahwa semakin tinggi pengeluaran semakin rendah persentase rumah

tangga penerima BPNT/Program Sembako. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penerima BPNT/Program Sembako didominasi oleh kelompok pendapatan bawah (D1 -D5) dengan persentase tiap desilnya lebih dari 10 persen. Pola yang hampir sama terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sementara itu, penerima BPNT/Program Sembako masih ditemukan pada beberapa rumah tangga di desil pengeluaran kelompok atas (D9-D10) walaupun persentasenya kurang dari 10 persen.

**c. Program Indonesia Pintar (PIP).** Berdasar Analisis Data Susenas Maret 2021, dinyatakan masih Terdapat Penduduk Kelompok Atas yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau anak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasar Analisis data Susenas Maret 2021 terlihat bahwa seluruh kelompok quintil penduduk menerima PIP, dimana kelompok 20 persen terbawah (Q1) menerima PIP lebih banyak dibanding kelompok atas yaitu sebesar 15,92 persen. Sementara itu, pada quintil 5 masih terdapat 2,24 persen rumah tangga menerima PIP.

**d. Program Keluarga Harapan (PKH).** Program PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pada tahun 2021, terdapat 10 juta KPM penerima PKH dimana besaran bantuan tergantung komponen yang menyertainya seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat. Lalu, komponen kesos terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Analisis Data Susenas Maret 2021, menunjukkan bahwa berdasarkan distribusi rumah tangga penerima PKH, semakin tinggi kelompok quintil pengeluaran semakin rendah persentase rumah tangga penerima PKH. Rumah tangga pada kelompok 20 persen terbawah (Q1) memiliki persentase yang paling tinggi sebagai penerima PKH yaitu sebesar 25,81 persen. Sementara itu, pada rumah tangga kelompok 20 persen teratas (Q5) ternyata juga masih ada rumah tangga yang menerima program ini yaitu sebesar 2,45 persen.

## **BAB VIII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

### **A. Pengertian UMKM**

Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu, bahwa konsep pemberdayaan merujuk kepada kemampuan seseorang yang ditujukan kepada kelompok rentan dan kelompok lemah sehingga mereka bisa memiliki kemampuan dan kekuatan dalam dua hal, yaitu: (1) memiliki kebebasan yang mencakup segala hal, yaitu bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dalam memperoleh kesehatan; (2) mendapatkan sumber-sumber produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan (Edi Suharto, 2010). Pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan untuk memperkuat atau memberikan keberdayaan pada sebuah kelompok atau individu-individu yang tidak berdaya yang mengalami keterbelakangan dan kemiskinan. Salah satu program/strategi Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah konsep yang merujuk kepada kelompok orang (pengusaha) yang memiliki aset dan omset dalam skala kecil, mikro, dan menengah. UMKM di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Beberapa istilah/konsep dalam undang-undang tersebut antara lain adalah :

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif, yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa :

Usaha mikro dalam perekonomian produktif yang dimiliki oleh perorangan, dengan kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan; Usaha kecil dalam perekonomian produktif adalah sebagai bentukan sendiri, baik yang dibentuk atas dasar individu maupun secara kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dalam usaha ini hanya dimiliki oleh perorangan dengan kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp 500.000.000,- ; Usaha menengah dalam perekonomian produktif yang bukan merupakan suatu cabang / anak perusahaan. Usaha ini adalah bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu usaha kecil atau besar dengan total kekayaan bersih mencapai Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- usaha ini tidak termasuk tanah ataupun bangunan. Berdasarkan kriteria hasil penjualan, usaha mikro omzet pejualannya maksimum 300 juta, usaha kecil 300 juta sampai 2,5 M, dan usaha menengah omzet pejualannya 2,5 M sampai 50 M.

#### **B. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Berdasarkan jumlah aset dan omset, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah seperti pada Tabel berikut :

Tabel 8.1. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah berdasar UU no. 20 Tahun 2008.

No	Usaha	Kriteria asset (Rp)	Kriteria omset (Rp)
1	Mikro	Maks. 50 juta	Maks.300 juta
2	Kecil	50-500 juta	300 juta- 2,5 Milyar
3	Menengah	500 juta- 10 milyar	2,5 milyar – 50 milyar

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Sejalan dengan perkembangan/pertumbuhan ekonomi, maka kriteria/batasan tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah ini mengalami perubahan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2022, tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-undang tahun 2008 berbeda dengan PP No 7 tahun 2021. Pada PP No 7 2021 Pasal 35 disebutkan:

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Perkembangan, selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya, Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

### **C. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Sebagaimana tercantum pada Bab II pasal 5 UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Di era otonomi daerah, program penanggulangan kemiskinan mengandung pengalaman mengenai peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama dikelola di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memberikan peluang peningkatan penanggulangan kemiskinan karena terkait jarak spasial dan juga temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin tersebut. Di samping itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa. Menurut Sumodiningrat (1996) Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yakni (1) kebijaksanaan tidak langsung mengarah pada sasaran melainkan memberikan dasar tercapainya kondisi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksanaan yang secara langsung tertuju pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) pola/model kebijakan yang diperlukan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1. Pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif (*conducive business climate*) sekaligus menciptakan lingkungan yang bisa (*enabling environment*) mendorong pengembangan UMKM secara mandiri, sistemik, dan berkelanjutan.
2. Kedua, menciptakan sistem penjaminan (*guarantee system*) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dioperasionalkan oleh UMKM.
3. Ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar "feasible" sekaligus "bankable" dalam jangka panjang.

Kebijakan dan strategi pertama pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus bisa menyusun regulasi-regulasi ekonomis yang bisa memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memberikan pemihakan yang tepat kepada semua pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kebijakan dan strategi kedua pada prinsipnya adalah jalan keluar terobosan terhadap adanya "gap" antara UMKM, dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank, dalam hal permodalan/pembiayaan usaha. Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria 5-C (*character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral*) yang merupakan aturan/mekanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan. Oleh karenanya wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema "kredit program" yang lebih banyak bersifat "dana hibah bergulir" kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro. Skema kredit program tersebut merupakan salah satu alternatif

strategi untuk membiayai kegiatan UMKM dan koperasi (terutama usaha mikro) yang berkesan lebih cenderung untuk ”mengabaikan” rigiditas kriteria 5-C yang diberlakukan kalangan perbankan.

Pemberdayaan UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan telah tertuang Dalam Program Aksi Pengentasan Kemiskinan yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Pebruari 2005. Dalam Program Aksi tersebut terdapat empat jenis kegiatan pokok yang dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro (Supriyanto, 2006)

Program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan tidak adanya diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Program ini berupaya mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM pada berbagai tingkat pemerintahan. Sasaran program ini adalah berkurangnya beban administratif dan hambatan usaha, menurunnya biaya usaha, meningkatnya rata-rata skala usaha, meningkatnya mutu layanan perijinan/pendirian usaha, mantapnya landasan legalitas UMKM, serta meningkatnya partisipasi stakeholders dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program UMKM.

Program aksi pengembangan sistem pendukung usaha bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan skala usahanya. Sasaran programnya adalah tersedianya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, permodalan, pasar, manajemen, teknologi, dan informasi, insentif usaha serta meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM dan meningkatnya jangkauan lembaga keuangan.

Program Aksi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, serta meningkatnya daya saing UMKM. Selama ini para pelaku UMKM masih mengandalkan *comparative advantage (resource-based)* namun belum *competitive advantage* yang berdasarkan penambahan nilai. Sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, tumbuhnya unit usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi, berkembangnya ragam produk produk unggulan UMKM sesuai dengan potensi daerahnya dan menjadikan UMKM yang feasible menjadi bankable.

Program Aksi Pemberdayaan Usaha Skala Mikro bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Sasaran dari program pemberdayaan usaha mikro adalah meningkatnya kapasitas usaha mikro, meningkatnya ketrampilan pengelolaan usaha, dan terselenggaranya kepastian, perlindungan, serta pembinaan usaha.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/Five finger philosophy, maksudnya masing-masing jari memiliki peran yang berbeda dan tidak dapat berdiri sendiri dan akan lebih kuat apabila digunakan secara bersamaan.

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of development* (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam regulator sektor riil dan fiskal, menerbitkan ijin-ijin usaha, mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.

3. Jari tengah, berfungsi sebagai katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit.
4. Jari manis, berfungsi sebagai fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, terutama usaha mikro, membantu UMKM untuk mendapatkan pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak.

#### **D. Kajian empiris Pemberdayaan UMKM**

Kajian yang dilakukan Ferry, dkk (2014) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan, menyebutkan bahwa : Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM ini adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang masih tergolong miskin. Hasil kajian Ferry, dkk (2014), Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dusun Waru Rejo ini membantu bagi masyarakat setempat dalam meningkatkan dan mengembangkan masing-masing usaha mereka. Rata-rata setiap warga yang mempunyai usaha dapat menampung 10-15 karyawan dalam satu rumah, sehingga hal tersebut dapat tingkat mengurangi pengangguran. Disebutkan pula bahwa proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah ini hanya sebatas

pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya bantuan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terdapat faktor pendukung dalam keberhasilan proses pemberdayaan UMKM tersebut, antara lain faktor terdapatnya sumber daya manusia yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai; bahan baku yang mudah ditemukan dan murah; modal usaha yang ringan; mendapat dukungan aparat desa; supplay bahan baku lancar dari pemasok; dan adanya kesepakatan harga jual produksi antara anggota kelompok usaha. Sedangkan faktor penghambat dalam pemberdayaan ini adalah infrastruktur yang kurang memadai atau rusak, kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya tempat pembuangan limbah dan tidak adanya sentra pemasaran hasil produksi.

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Hal ini menyebabkan UMKM tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Walaupun UMKM mampu bertahan dari adanya krisis global tetapi pada kenyataannya banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hal itu disebabkan oleh secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang belum terselesaikan seperti masalah ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi, upah buruh dan lain-lain.

#### **D.1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan UMKM.**

Terdapat faktor pendukung dalam keberhasilan proses pemberdayaan UMKM yaitu : antara lain faktor terdapatnya sumber daya manusia yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai; bahan baku yang mudah ditemukan dan murah; modal usaha yang ringan; mendapat dukungan aparat desa; supplay bahan baku lancar dari pemasok; dan adanya kesepakatan harga jual produksi antara anggota



kelompok usaha.. Sedangkan faktor penghambat dalam pemberdayaan ini adalah infrastruktur yang kurang memadai atau rusak, kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya tempat pembuangan limbah dan tidak adanya sentra pemasaran hasil produksi (Ferri, dkk, 2014).

Agar perekonomian stabil, maka kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global perlu dipikirkan agar tetap mampu bertahan. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui *capacity building*, dan pengembangan *information technology* (IT).

Demikian juga upaya-upaya lainnya dapat dilakukan melalui kampanye cinta produk dalam negeri serta memberikan suntikan pendanaan pada lembaga keuangan mikro. Keuangan mikro telah menjadi suatu wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode untuk mengatasi kemiskinan . Berbagai lembaga multilateral dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program kerjasama. Pemerintah di beberapa negara berkembang juga telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Lembaga swadaya masyarakat juga tidak ketinggalan untuk turut berperan dalam aplikasi keuangan mikro (Prabowo dan Wardoyo, 2003).

Sabirin (2001) mengemukakan bahwa untuk memberdayakan masyarakat katagori ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan memfasilitasi sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Satu diantara strategi pembiayaan bagi kelompok ini adalah usaha kredit mikro. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpenghasilan rendah dan tergolong dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal

perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena Keberhasilan program pemberdayaan UMKM akan tercapai bila semua stakeholder berkontribusi, berperan bersama sesuai peran masing-masing. Pemerintah Daerah, para pelaku UMKM dan dunia perbankan yang dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka keberhasilan dan kemajuan UMKM akan cepat terlaksana. Dengan demikian pada akhirnya peningkatan penerimaan pajak dari sisi penggalan wajib pajak baru maupun nilai pajaknya akan terus meningkat. Pemerintah sebagai regulator, pada prinsipnya telah banyak mengeluarkan program atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM. Program ini perlu terus dioptimalisasikan. Program-program tersebut antara lain.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi.
3. Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)  
PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).
4. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Demikian halnya program-program yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam wujud Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini diawali dari kepedulian dari BUMN guna memberdayakan UMKM melalui bagian laba sebesar 2,5 persen yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan UMKM. Dilain pihak Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian lainnya langsung melakukan pembinaan terhadap UMKM di seluruh wilayah tanah air. Termasuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan langsung melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas pajak kepada UMKM.

Pemberdayaan UMKM diharapkan bisa dilaksanakan oleh pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mereka punyai, antara lain melalui bapak angkat, plasma, pembinaan manajemen dan berbagai kegiatan dalam pemasaran produk UMKM. CSR diharapkan juga digulirkan oleh industri perbankan Indonesia guna memberikan kemudahan dan akses kredit kepada para pelaku UMKM.

## **D.2. Pemberdayaan UMKM di masa pandemi.**

Kajian tentang Pemberdayaa UMKM di masa pandemi, yang dilakukan Oleh Via Lailatul, dkk (2022). Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa beberapa kendala yang dialami pelaku UMKM desa Tanggung terletak pada inovasi produk, proses pemasaran produk dan kurangnya keterampilan pelaku UMKM. Sehingga strategi pemberdayaan yang paling dibutuhkan para pelaku UMKM adalah pemberdayaan inovasi produk, pemasaran produk dan keterampilan. Dengan pemberian pelatihan dan monitoring kepada pelaku UMKM. Diharapkan UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat Covid-19

Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 hingga mengancam kelangsungan bisnis banyak pelaku. Meskipun seluruh lapisan masyarakat memang terdampak Covid-19, tetapi penyelamatan UMKM dari dampak Covid 19 dinilai sangat penting bagi perekonomian. Salah satu dampaknya, UMKM mengalami penurunan pendapatan dan omset. Kendala keuangan itu berimbas terhadap para karyawan/pekerja, karena penurunan kegiatan operasional kerap berakhir dengan pengurangan jumlah karyawan/pegawai (Utami, 2021). Berdasarkan data Kemenkop-UKM, sebanyak 99,99 persen dari total pelaku usaha atau setara dengan 64 juta pelaku usaha berasal dari UMKM, dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, yakni mencapai 117 juta orang atau 97 persen dari total tenaga kerja (ekonomi.bisnis.com).

Adapun dampak yang ditimbulkan pandemi Covid 19 terhadap UMKM meliputi 5 aspek yakni :

(1) Aspek penjualan yaitu rata-rata penurunan penjualan UMKM,

- (2) Aspek laba usaha. Ratarata penurunan laba usaha,
- (3) Aspek permodalan. Jumlah UMKM yang mengalami permasalahan pada permodalan meningkat,
- (4) Aspek jumlah karyawan. Pada aspek ini, UMKM melakukan pengurangan jumlah karyawan, dan
- (5) Aspek kemampuan pembayaran angsuran bank. Hampir semua pelaku UMKM (terutama pelaku usaha mikro) mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan (Nasution et al., 2020).

Kajian ini juga menemukan bahwa pelaku UMKM di Desa Tanggung sudah menerapkan strategi penjualan online, meskipun belum semuanya. Jumlah UMKM yang melakukan strategi online meningkat saat adanya Covid 19. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan offline.

## **BAB IX. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL**

### **A. Pendidikan Non Formal**

Dalam Undang-undang Pendidikan No 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada peraturan UU no 20 tahun tentang sistem pendidikan nasional (Pasal 12 ayat 1) dinyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jalur pendidikan di Indonesia, yaitu : pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selain itu ada konsep Pendidikan berbasis masyarakat, yaitu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Nonformal dapat dilaksanakan antara lain melalui : (1) kelompok belajar, (2) tempat untuk penitipan anak, (3) sanggar, (4) tempat kursus, (5) majelis taklim, dan (6) lembaga pelatihan khusus.

Pelaksanaan pendidikan Non-Formal harus mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan secara spesifik berdasar pada asas pendidikan nonformal. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut :

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

#### **B. Ciri-ciri Pendidikan Nonformal**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pendidikan No 20 Tahun 2003, pasal 26 bahwa :

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Berdasarkan uraian /ketentuan tersebut , ciri-ciri pendidikan Non Formal adalah :

1. Memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan.
2. Berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajar.
3. Waktu pembelajaran tidak mempengaruhi
4. Kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan
5. Hubungan guru dan siswa bersifat mendatar
6. Ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa

### **C. Asas Pendidikan Nonformal**

1. Asas Prinsip Inovasi. Kebutuhan siswa harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal. Oleh karena itu, dalam mengembangkan inovasi, aspek-aspek seperti norma, nilai, teknologi, dan metode perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
2. Asas Prinsip-prinsip untuk menetapkan dan mengembangkan visi pendidikan nonformal. Hal ini berkaitan dengan standar minimal yang dicapai siswa, dengan mempertimbangkan berbagai jenis



dan tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat, yaitu tentang menetapkan tujuan.

3. Asas Pokok-Pokok rencana dan mengembangkan Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut:
  - (a) Menyeluruh Artinya program atau kegiatan yang direncanakan harus sejalan dengan tujuan di atas.
  - (b) Keterpaduan adalah suatu rencana yang meliputi program pendidikan formal dan informal yang terkoordinasi sehingga jenis program pendidikannya selaras satu sama lain.
  - (c) Pertimbangan aspek kuantitatif dan kualitatif. Di bidang pendidikan nonformal, kemampuan belajar dan bekerja perlu ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif
  - (d) Sumber pemerintah dan informasi swasta atau pemerintah daerah Tinjauan semua sumber yang tersedia atau terpercaya dalam bentuk integrasi dan penggunaan semua sumber yang tersedia dari kedua sumber.

#### **D. Beberapa kajian empiris pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan Non Formal**

Berdasarkan uraian tentang konsep pendidikan, khususnya pendidikan nonformal, juga ciri-ciri dan asas pendidikan Nonformal, dapat diungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan Nonformal. Beberapa kajian empiris telah dilakukan para ahli, di berbagai wilayah dan berbagai bentuk pendidikan Nonformal. Selain itu, dalam kaitannya dengan Pemberdayaan masyarakat dipedesaan, kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan penyuluhan pertanian.

Beberapa contoh kajian empiris pemberdayaan Masyarakat melalui pendidikan :

1. Pemberdayaan melalui Program Ketrampilan Produktif di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rawasari Jakarta Timur (Puji Hadiyanti, 2008).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Salah satu pengembangan potensi manusia dapat

diwujudkan melalui kegiatan pendidikan berbasis kemasyarakatan. Kegiatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan permasalahan oleh masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada di lingkungannya.

Pendidikan yang bertumpu pada masyarakat adalah pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, berada di tengah masyarakat, mengandalkan kekuatan masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat, dan pengelolaan pendidikan ada di tangan masyarakat. Pendidikan yang bertumpu pada masyarakat mengarah pada pemandirian masyarakat dalam mengelola pendidikannya. Semua badan, instansi atau organisasi dapat mengambil bagian di dalam pendidikan yang bertumpu pada masyarakat karena tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan, tidak mengadakan pembedaan, serta mereka juga tidak mengendalikan jalannya pendidikan karena pendidikan ini adalah milik masyarakat. Dengan demikian, orientasinya adalah kebutuhan sekarang

Sebagai contohnya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM adalah Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C yang tujuannya adalah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak mampu bersekolah di jalur sekolah. PKBM itu sendiri merupakan salah satu strategi perwujudan yang telah, sedang, dan akan terus dirintis dan dibumikan untuk menggali serta menumbuhkembangkan pendidikan berbasis emasyarakatan yang merupakan konsep dan aspek acuan kerja Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Selain kegiatan Kejar Paket, PKBM juga melaksanakan program pemberdayaan dalam bentuk keterampilan produktif yang berorientasi pada kebutuhan sekarang, di antaranya adalah kursus yang diperuntukkan bagi kaum ibu, remaja putri, dan pemuda, seperti kursus menjahit, sablon, montir, dan memasak. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat sehingga mereka menjadi mandiri yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kesimpulan hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam melaksanakan Strategi Pemberdayaan Masyarakat, pihak penyelenggara dalam hal ini PKBM Rawasari belum sepenuhnya

melakukan pemberdayaan secara holistik. Walaupun demikian, kebermanfaatan dari program pemberdayaan yang ada sangat dirasakan oleh peserta program pemberdayaan. Namun, dalam strategi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada konsep-konsep pemberdayaan. Seperti dalam tahap sosialisasi yang dianggap kurang maksimal sehingga program pemberdayaan yang ada kurang mengena pada sasaran yang lebih membutuhkan. Pengaruh dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, hubungan antara pihak penyelenggara dengan peserta program pemberdayaanpun kurang harmonis. Begitu pula halnya dengan proses penentuan program pemberdayaan yang kurang melibatkan masyarakat. Program-program yang ada dibatasi oleh ketersediaan dana yang ada. Di samping itu, tidak ada penyaluran dari pihak penyelenggara program kepada pengguna jasa.

Dari hasil kajian tersebut direkomendasikan kepada para pengambil kebijakan :

- a. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, sebaiknya peserta program merupakan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.
  - b. Masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan program.
  - c. Hendaknya dilakukan proses sosialisasi secara masif sebelum pelaksanaan program pemberdayaan.
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Pinilih” di desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Febriana, dkk, 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan strategi yang dikembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Pinilih” dengan subyek penelitian pengurus dan warga belajar PKBM Pinilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan sumber data berasal dari observasi, wawancara dan dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yaitu ketua dan warga belajar PKBM serta informan pendukung adalah staff pengajar dan alumni warga

belajar. Observasi berkaitan dengan partisipasi warga Desa Gumpang terhadap PKBM Pinilih. Dokumen yang di gunakan berkaitan dengan jumlah warga belajar, struktur kepengurusan, dan data staff pengajar. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan informan dengan cara purposive. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Gumpang dan sekitarnya diwujudkan dalam bentuk tenaga pikiran, sebagai staff pengajar, sarana prasarana, uang, dan menjadi warga belajar. Strategi yang di kembangkan PKBM Pinilih dalam mengelola lembaga sosialnya antara lain dengan cara menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menyediakan berbagai macam koleksi buku melalui perpustakaan PKBM, memberikan kriteria bagi calon pengelola, pengurus dan staff pengajar, dan menjalin kemitraan dengan beberapa instansi.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal di Metro Lampung. (Studi Kasus PKBM AL-SUROYA), ( M. Ihsan Dacholfany, 2018)

Penelitian ini mengkaji tentang pendidikan non formal yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat beragam dalam hal pengetahuan dan informasi fungsional yang diperlukan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup mereka. Selain itu juga untuk mendapatkan keterampilan yang relevan sebagai bekal mencari nafkah, sehingga warga negara mempunyai sikap mental pembaharuan dan pembangunan untuk kemajuan dan perkembangan dalam suatu negara. Penelitian di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) al-Suroya yang di dalamnya ada Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan khususnya Paket B dan Paket C dan lainnya dapat memenuhi suatu fungsi dalam usaha melayani kebutuhan masyarakat di luar sistem persekolahan, sasaran utama pendidikan nonformal dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan, serta mengembangkan kemampuannya minat

dan bakat serta pelatihan, dengan harapan program ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat walaupun banyak hambatan.

Kemunculannya lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu diperlukan seperangkat teknik-teknik yang dapat menciptakan kondisi adanya keberdayaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dengan melakukan kegiatan pendidikan non-formal di masyarakat. Pendidikan Non-Formal sebagai bagian dari sistem pendidikan yang memiliki tugas yang sama dengan pendidikan lainnya (pendidikan formal) yakni memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

Dengan adanya pendidikan nonformal diharapkan dapat memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tertentu yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan di pendidikan formal (sekolah). Hal ini mungkin terjadi karena yang karena mereka putus sekolah karena permasalahan ekonomi, usia ataupun karena faktor-faktor lain, sehingga tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud karena adanya kerjasama antara semua pihak, termasuk masyarakat (peserta didik) dan pemerintah, maka pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) ingin melayani, dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus berani meniru apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat . Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah dalam membantu menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh jalur formal/sekolah.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal. (Supsilani, 2019).

Artikel ini mengkaji tentang pendidikan non formal yang tidak kalah pentingnya dengan pendidikan formal dari semua tingkat pendidikan. Pendidikan non formal juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan penduduk dalam hal pengetahuan, informasi dan teknologi. Semua itu menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat. Pendidikan non formal dilaksanakan untuk

mendapatkan keterampilan yang relevan bagi bekal mencari nafkah sehari-hari. Keterampilan yang didapatkan, menjadikan masyarakat memiliki sikap mental mandiri, pembaharuan dan pembangunan untuk kemajuan dan perkembangan negara. Kemandirian dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari yang nerasala dari keahlian didapat, untuk dapat dan bisa dinikmati, berasal atas usaha sendiri. Begitupun hasil yang didapat, bisa dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan .

#### **E. Penyuluhan Pertanian sebagai bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

Sejarah mengungkapkan bahwa peran penyuluhan pertanian, setelah revolusi hijau, tidak menghasilkan kesejahteraan bagi petani kecil. Sehingga struktur komunikasi yang dikembangkan cenderung diganti dari model-model yang mengikuti struktur komunikasi “guru-murid”/top down, berkembang ke arah pola komunikasi dyadic dan menjadi struktur komunikasi “petani sebagai partner”. Artinya, kegiatan komunikasi penyuluhan berkembang menjadi “saling belajar” dan karena itu fungsi penyuluh lebih difokuskan pada fasilitator untuk memperbaiki petani dan usahatannya melalui usaha belajar berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi. Peran penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat hendaknya tidak hanya sebagai objek pembangunan, melainkan harus dilibatkan sebagai subjek atau mitra pembangunan yang perlu mengalami suatu proses belajar dan mengetahui adanya kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memanfaatkan kesempatan itu, serta mau bertindak memanfaatkan kesempatan memperbaiki kehidupannya.

Penyuluhan pada beberapa kegiatan pembangunan masyarakat (*community development*) dan penyuluhan *capacity building* (penguatan kapasitas) berubah fungsi sesuai dengan perkembangan SDM-klien/petani. Peran penyuluh dalam hal ini menjadi konsultan

yang sasarannya meningkatkan kelembagaan masyarakat petani maupun kapasitas SDM klien. Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten, sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani lebih menguntungkan (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*), dan lingkungan lebih sehat. Oleh karena itu petani diharapkan aktif mencari, mendapatkan, meminta pendampingan atau layanan akan informasi yang dibutuhkan serta aktif mendatangi penyuluh atau mengontak sumber informasi penyuluhan, sehingga dapat dikatakan, model komunikasi bukan lagi berupa penyuluhan “tetesan minyak” berpola “guru-murid”/top down atau mengandalkan penyuluhan sistem LAKU (Latihan dan Kunjungan) yang berpola dyadic memadukan kepentingan top down dan bottom up dengan pendekatan komunikasi interpersonal maupun kelompok. Penyuluhan lebih diarahkan pada peningkatan *capacity building* atau membangun kemampuan masyarakat, guna mendukung pengembangan masyarakat berkelanjutan.

Penyuluhan pertanian dituntut agar mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani, nelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian, serta mendampingi petani untuk: (1) membantu menganalisis masalah sosial yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan ke depan; (2) membantu mereka menemukan masalah; (3) membantu mereka memperoleh pengetahuan dan informasi guna memecahkan masalah; (4) membantu mereka mengambil keputusan, dan (5) membantu mereka menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya. Pada masa yang akan datang pembangunan nasional diarahkan menuju pada era industrialisasi di bidang pertanian melalui pengembangan sistem agribisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini akan bisa diwujudkan dengan lebih dahulu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama masyarakat pertanian dalam hal ini penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk itu pendidikan petani perlu dilakukan dalam bentuk penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien. Kestinambungan dan ketangguhan petani dalam



pembangunan pertanian bukan saja diukur dari kemampuan petani dalam mengelola usahanya sendiri, tetapi juga ketangguhan dan kemampuan petani dalam mengelola sumber daya alam secara rasional, efektif dan efisien, berpengetahuan, terampil, cakap dalam membaca peluang pasar dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia, khususnya perubahan pembangunan pertanian. Terkait hal ini penyuluhan pertanian penting untuk membangun dan menghasilkan SDM yang berkualitas.

Upaya untuk mencapai hal tersebut diperlukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang berpedoman pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluh yang kompeten, mekanisme dan tata kerja yang jelas termasuk supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan pembiayaan yang memadai pada penyelenggaraan penyuluhan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2006 yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dari pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan penyuluhan ini diselenggarakan melalui perencanaan program penyuluhan yang disusun secara partisipatif antara penyuluh dengan petani berdasarkan kegiatan-kegiatan pertanian di wilayah tugas penyuluh pertanian. Proses transfer inovasi teknologi pertanian tersebut dilakukan melalui komunikasi yang efektif dan efisien berdasarkan motivasi penyuluh, kompetensi penyuluh, manajemen kelembagaan penyuluh, dan dukungan dana pada setiap pelaksanaan penyuluhan.

Pelaksanaan penyuluhan akan berhasil dengan baik, jika penyuluh mampu melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan program penyuluhan. Hal ini bermanfaat untuk keberhasilan dan keberlangsungan penyelenggaraan program penyuluhan. Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan program penyuluhan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kondisi lingkungan pertanian dan kondisi lingkungan bisnis pertanian yang

akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal dan potensi daerah.

## **BAB X. IMPLEMENTASI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN**

### **A. Program-program Pemberdayaan Petani**

Upaya pemberdayaan petani secara operasional dan terarah di Indonesia sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun, meskipun istilah pemberdayaan baru mulai populer pada tahun 1990 an. Secara konseptual pemberdayaan mengalami berbagai penyempurnaan dengan pendekatan pelaksanaan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah melalui Departemen Pertanian hingga saat ini. Program-program tersebut antara lain : Program Bimas (Bimbingan Masal), Inmas (Intensifikasi Masal), Insus (Intensifikasi Khusus), Supra Insus, SUTPA (Sistem Usaha Tani Padi berorientasi Agribisnis), Proksidatani (Program Pemberdayaan Masyarakat Tani menuju Ketahanan Pangan Nasional), P4M2T (Program peningkatan Penyuluhan Pertanian untuk Memberdayakan Masyarakat Tani), P4K (Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil), KUM ( Karya Usaha Mandiri ), P2LK (Peningkatan Produksi Lahan Kering), PHT (Pengendalian Hama Terpadu), KUF (*The Kalimantan Up-land Farming System*), DELIVERI (*Decentralized Livestock Services in Eastern Part of Indonesia*), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, dan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan).

Diantara program-program tersebut, P4K lahir tahun 1979/1980, sekaligus menjadi titik awal pelaksanaan proyek *people-centered* bersamaan dengan terjadinya pergeseran paradigma pembangunan ke arah, *participatory, and enviromentally as well as socially sustainable*. Intinya adalah bahwa manusia harus dijadikan titik sentral pembangunan. Selama 20 tahun proyek ini digulirkan telah mengalami tiga tahapan perkembangan, yang telah berhasil mengembangkan metodologinya melalui 3 strategi, 7 prinsip, dan 15 langkah. Yang dimaksud 3 strategi adalah : (1) pengembangan sumberdaya manusia, (2) pengembangan kemampuan dan pemodal,

(3) pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat. Walaupun keberhasilan telah dicapai, antara lain meningkatnya jumlah Kelompok Petani Kecil (KPK), evolusi fasilitator dari bentuk pembina kelompok yang di kontrak, berkembang ke PPL Pemda dan PPL Swakarsa, Kelembagaan PNK, telah berkembang dari KPK menjadi Gabungan KPK dan Koperasi, tetapi masih ada kendala-kendala, yaitu : (1) **Kebijaksanaan**, yakni peran pemerintah pusat masih dominan, manajemen sentralistik, dan keberpihakan pada rakyat miskin belum terlalu kuat, (2) **Kelembagaan**, terdapat proyek pembangunan pertanian dan pedesaan dengan pendekatan berbeda bahkan bertentangan dengan P4K, (3) **Metodologi**, untuk masuk ke arus utama pedesaan masih belum mantap kendatipun metodologi untuk pengembangan KPK sudah cukup mantap, (4) **Sumberdaya manusia**, PPL selaku andalan penting untuk kegiatan P4K belum sepenuhnya siap melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Persoalan ini erat kaitannya dengan waktu yang dimiliki PPL berkisar sekitar 20-30%, ditambah dengan kapasitas keterampilan dan pengetahuan yang relatif terbatas.

Dari sisi makro, dunia pertanian saat ini berada pada babak baru dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang tergolong memiliki perpekstif luas dan mendasar. Dua diantara kebijakan tersebut adalah pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) 2005-20025, dan telah dikeluarkannya Undang-undang No 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang-undang ini merupakan impian lama kalangan penyuluhan yang sudah diwacanakan sejak tahun 1990-an.

Pada kedua kebijakan tersebut masalah kelembagaan tetap merupakan bagian yang esensial, baik kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Di tingkat makro, dibentuk lembaga baru Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai lembaga pemerintah non departemen, yang akan merumuskan secara terperinci tentang metode penyuluhan, strategi penyuluhan, dan kebijakan penyuluhan. Di tingkat mikro akan dibentuk beberapa lembaga baru misalnya : Pos Penyuluhan Desa dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan lembaga andalan baru, meski Gapoktan telah

dikenal sejak awal 1990an. Saat ini Gapoktan diberi pemaknaan baru, termasuk bentuk dan peran yang baru. Gapoktan telah menjadi gerbang (*gateway institution*) yang menjadi petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan pemodalanan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan petani (Syahyuti, 2007 : 16).

Beberapa bukti empiris berkaitan dengan program pemberdayaan petani, menunjukkan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia harus dikedepankan. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani menerapkan teknologi, kemampuan PPL sebagai agen pembaharu, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, peran wanita, dan kelembagaan petani merupakan kajian yang menunjukkan ada kaitan erat dengan tujuan pemberdayaan petani, yakni petani lebih mampu dan berdaya, mencukupi kebutuhannya, melalui peningkatan perproduksi dan pendapatannya.

Hasil Penelitian tentang “ Pembinaan kelompok Petani Kecil dan Hubungannya dengan Pemanfaatan Kredit pada Proyek P4K di Desa Senuro OKI, menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pembinaan oleh peserta Proyek P4K. (Sriati, Yulian Junaidi, dan Iswadi Idris PPL dengan kemampuan pemanfaatan kredit, 2004 : 336-347). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan/keberadaan PPL merupakan hal penting dalam pemberdayaan petani. Fungsi PPL selain sebagai pembina juga sebagai pentransfer teknologi dan pengetahuan agar petani lebih mampu beradaptasi dengan perubahan (terutama teknologi) sesuai dengan usahatannya. Bukti empiris menunjukkan bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan produksi dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani. Hasil penelitian tentang respon petani terhadap proyek pengembangan bangkit kedelai menunjukkan bahwa respons petani termasuk kategori tinggi, dan terdapat korelasi positif antara respon petani dengan produksi (Sriati et al. 2007, 19-28).

Transfer pengetahuan diantara petani akan lebih efektif dalam wadah kelompok tani. Penelitian tentang Penerapan Teknologi ATABELA (alat tabur benih langsung) pada petani anggota dan

bukan anggota kelompok, menunjukkan bahwa petani anggota kelompok penerapan teknologinya lebih bagus. Kelompok merupakan wadah bagi petani yang bisa dijadikan wahana transfer pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknologi baru. Selain itu juga : teknologi akan meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani ( Sriati, 2004 : 96-104).

Pemberdayaan petani melalui usaha kelompok, misalnya : terlihat pada kasus pemberdayaan wanita tani dalam kebun kolektif menunjukkan bahwa umur dan pendidikan berpengaruh pada tingkat partisipasi wanita tani (Sriati et al, 2007, 63-74). Partisipasi wanita pada usaha produktif akan meningkatkan pendapatan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini terbukti dari hasil penelitian tentang curahan tenaga kerja wanita dan hubungannya dengan pendapatan usahatani padi lebak menunjukkan bahwa : terdapat korelasi positif signifikan antara curahan tenaga kerja dengan pendapatan wanita (Sriati, et al, 2007 :26-30).

Sebagaimana telah disebutkan bahwa secara ideal partisipasi masyarakat dalam pembangunan, harus mencakup: tahap perencanaan (pembuatan keputusan), pelaksanaan (penerapan keputusan), pemanfaatan hasil dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat terutama penting dalam hal menetapkan kebutuhan yang nantinya akan dijadikan sebagai masalah yang akan dicari pemecahannya. Penetapan kebutuhan yang tidak sinkron antara sasaran program (masyarakat petani) dengan kebutuhan berdasarkan pelaksana program ( pemerintah/PPL) mengakibatkan program-program pembangunan tidak bersifat langgeng. Studi empiris berkaitan dengan penetapan kebutuhan, yang dilakukan Sriati (1991), dalam studi tentang Analisis kebutuhan Pelatihan bagi Peternak sapi Perah di Kabupaten Bogor membuktikan bahwa perbedaan persepsi antara peternak dengan PPL (pembuat kebijakan) dalam penetapan kebutuhan (misalnya materi Pelatihan) akan mengakibatkan kurang keberhasilan/kelancaran program. Dengan kata lain terdapat kesenjangan antara "*real need*" (kebutuhan riil (nyata) sebagaimana dilihat pembuat program (PPL) dengan "*felt need*" (kebutuhan yang dirasakan) peternak sebagai sasaran program. Dari studi ini, yang

harus digaris bawahi adalah bahwa PPL sebagai agen pembaharu adalah bahwa PPL harus mampu menjadikan *real need* (kebutuhan nyata) juga menjadi kebutuhan yang dirasakan petani. Hal ini dapat dilakukan melalui transfer pengetahuan dan teknologi, sehingga petani memiliki wawasan yang luas mampu menjangkau permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan petani, peran PPL sebagai pembaharu harus mampu menjadikan petani lebih mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan sebagai akibat dinamika kemajuan teknologi. Penyuluh harus memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Bukti empiris menunjukkan bahwa kemampuan dan motivasi penyuluh berpengaruh terhadap kinerjanya dan pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja petani yang dibinanya (Sriati, 2008).

Dalam kaitannya dengan tujuan pemberdayaan, kinerja petani dalam usahatani diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sebagai contoh Penelitian tentang Analisis Kinerja peternak Sapi Bali Mandiri dan Peserta Program Pengembangan Peternak Kecil (P3K) di Kec.Kikim Timur Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa produktivitas kinerja peternak mandiri dengan peserta P3K tidak berbeda nyata. Namun demikian tingkat kelayakan usahatani peternak Mandiri lebih rendah dari peternak peserta P3K. (Sukirno, Sriati, Amruzi Minha : 2008).

Perkembangan suatu kelompok erat kaitannya dengan kualitas SDM Terdapat kecenderungan bahwa anggota yang lebih maju dan inovatif memperoleh manfaat yang lebih besar dari program BPLM (Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat) tersebut. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM mereka yang lebih baik dari pada anggota lainnya sehingga mereka mempunyai prakarsa yang lebih baik. (Edi Basuno, dan Rita Nur Suhaeti, 2007 : 150-156).

Hal serupa terlihat pada penelitian tentang Dinamika kelompoktani Peserta Sekolah Lapangan Agribisnis (SL-A) dan keterampilannya dalam pemeliharaan jagung Pioneer, menunjukkan



bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat dinamika kelompok tani dengan ketrampilan penerapan teknologi pemeliharaan jagung (Sriati, Selly Oktarina, Deska Efrida, 2004 : 114-123). Dinamika kelompok erat kaitannya dengan kepemimpinan.

Pendekatan pemecahan masalah sebatas ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan memadai karena tantangan yang dihadapi bersifat multidimensional; -menembus ranah sosial –ekonomi, politik dan bahkan etika. Hodges (2005) dalam Budi Widianarko (2006 : 177) justru mengusulkan kepemimpinan (*leadership*) dan kearifan (*wisdom*) sebagai modal utama untuk memperbaiki *governance* pangan global.

Dalam kaitan dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri, peran pemimpin di berbagai tingkatan juga memiliki peran yang sangat besar dan penting. Untuk itu, kepemimpinan harus mampu membangun sistem agribisnis yang memiliki nilai (*values*), arah yang jelas, struktur yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memiliki daya saing yang tinggi (Syamsul Ma'arif, 2008:73) Dengan demikian sistem agribisnis diharapkan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mengantisipasi dan menjawab kebutuhan di masa yang akan datang serta mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Sebagai konsekuensinya, sistem agribisnis dan nasional akan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lebih terintegrasi, lebih terampil dan lebih memuaskan seluruh pelakunya.

Bukti empiris tentang kepemimpinan, antara lain penelitian tentang “Peran pemimpin Setempat dan proses Perubahan perilaku Petani berdiversifikasi Pertanian” menunjukkan bahwa Pemimpin Setempat berpengaruh pada perilaku anggota kelompok masyarakatnya dalam berdiversifikasi Pertanian. Selain itu juga dibuktikan bahwa Kelompok Tani merupakan wahana belajar dan transfer pengetahuan, serta transfer nilai-nilai yang ada, dan efektif untuk mencapai tujuan. Pemimpin setempat yang dimaksud meliputi : Kepala Desa, Ketua Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) (Sriati, 1996).

Memperhatikan dokumen RPKK, maka kelembagaan di RPKK dapat dipilah menjadi 3 level, yaitu level pemerintah daerah, level di pemerintah pusat, daerah dan level lokal di tingkat petani. Level pemerintah daerah perlu dibedakan dengan tegas, karena dengan semangat otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi relatif besar. Kelembagaan di pusat mengaitkan tata hubungan kerja antar departemen, lembaga, atau *stakeholders*. Pada tataran ini kewenangan utama kelembagaan utama adalah dalam hal pembuatan kebijakan. Beberapa kebijakan yang perlu dirumuskan antara lain : kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi, berupa kebijakan peningkatan investasi swasta, penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan, kebijakan pewilayahan komoditas, dan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM Pertanian (Syahyuti, 2007:18).

Secara teoritis “koordinasi” dan ‘sinkronisasi” merupakan dua perhatian utama dalam bidang kelembagaan. Lemahnya kelembagaan pertanian, seperti perkreditan, lembaga input, pemasaran, dan penyuluhan; telah menyebabkan belum dapat menciptakan suasana kondusif untuk pengembangan agroindustri perdesaan. Selain itu lemahnya kelembagaan ini berakibat pada sistem pertanian tidak efisien, dan keuntungan yang diterima petani relatif rendah.

Hasil penelitian tentang “ Perilaku Petani dalam Pemasaran hasil Kakao di Bandar Silou, Simalungun Sumatra Utara, menunjukkan bahwa : lembaga ekonomi (koperasi petani) berperan dalam peningkatan pendapatan petani, selain itu perilaku petani (pengetahuan dan persepsi) dalam menjual kakao akan berpengaruh (berhubungan ) dengan pendapatannya (Sriati, etal. 2007 : 142-151).

Secara konseptual, tiap kelembagaan petani yang dibentuk dapat memainkan peran tunggal atau ganda. Berbagai peran yang dapat dilakukan sebuah lembaga adalah sebagai lembaga pengelola sumberdaya alam (misalnya P3A), untuk tujuan aktivitas kolektif (kelompok kerja *sambat sinambat*), untuk pengembangan usaha (KUA dan koperasi), untuk melayani kebutuhan informasi (kelompok Pencapir), untuk tujuan representatif politik (HKTI), dan lain-lain.(Syahyuti, 2007:19).

Beberapa penelitian berkaitan dengan kelembagaan antara lain :

Penelitian tentang Karakteristik dan persepsi petani terhadap lembaga pemodal di Kab. Musi Rawas menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap kinerja lembaga pemodal adalah usia lembaga pemodal, sementara faktor lainnya yaitu : modal lembaga tani, klasifikasi kelompok tani, pendidikan, pengurus lembaga pemodal, dan sistem lembaga pemodal tidak berkaitan dengan persepsi petani terhadap kinerja lembaga pemodal (Sriati, Riswani, Uyun Sofiati, 2007: 79-89).

Penelitian tentang Pola Kemitraan antara Petani Tebu Rakyat dengan PTPN VII unit Usaha Bungamayang dalam usahatani Tebu (Lampung Utara), menunjukkan bahwa : terdapat perbedaan aktivitas hubungan kemitraan antara petani tebu anggota Tebu Rakyat Kredit (TRK) dengan Tebu Rakyat Bebas (TRB). Faktor yang berhubungan dengan keputusan petani menjadi anggota TRK adalah : modal, akses ke lahan, dan pengalaman (Sriati, et al, 2008 : 119-126).

Penelitian tentang Respon Petani Kredit Usaha Tani (KUT) dan hubungannya dengan produktivitas dan pendapatan menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara respon petani terhadap KUT dengan produktivitas usahatannya (Sriati, Nukmal, Masriyadi, 2004: 24-29).

Untuk menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan informasi teknologi pertanian, maupun informasi pasar, Deptan akan membenahi kelembagaan penyuluhan. Penataan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari propinsi sampai ke desa, yaitu berupa bantuan sewa/kontrak bagi 1698 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian), pengembangan 88 BPP model di 6 Propinsi RPKK, serta penguatan kelompok tani dan pengembangan koperasi tani (Badan SDM Pertanian, 2006). Selain itu akan dilakukan pengangkatan 3000 tenaga penyuluh pertanian honorer, revisi SK Menkowsabngpan N0 19/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Selain itu juga penyediaan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi 26.820 orang penyuluh pertanian, penyediaan alat komunikasi, dan penyusunan buku kerja bagi penyuluh pertanian.

Menurut Laporan Deptan (2006), sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah kelembagaan petani yang tercatat adalah 293.568 kelompok tani, 1365 asosiasi tani, 10.527 koperasi tani, dan 272 P4S. Sekarang ini 375 Kabupaten/kota atau 86 persen dari total kabupaten/kota mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk Badan/Kantor/Balai/Sub dinas/Seksi/UPTD/ Kelompok Penyuluh Pertanian. Sisanya yaitu 61 kabupaten/ kota (14%) bentuk kelembagaannya tidak jelas. Sementara itu di Kecamatan, kelembagaan penyuluhan pertanian yang terdepan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada saat ini dari 5187 Kecamatan baru terbentuk 3,557 unit (69%). Dengan tahun 2006, setidaknya sudah dibentuk 3000 unit Gapoktan. Khusus untuk tahun 2007, Deptan menargetkan pembentukan 22 ribu unit Gapoktan. Pembentukan Gapoktan didasari oleh visi yang dibawa, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di perdesaan melalui pertanian, diantaranya adalah dengan membentuk Gapoktan (Sekjen Deptan, 2006).

Untuk memperbesar peluang survival pertanian Indonesia dalam menghadapi tantangan global ini ditawarkan lima strategi, yaitu : (1) advokasi perdagangan internasional, (2) adaptasi terhadap perkembangan teknologi, (3) produksi komoditi bernilai tinggi dan produk alternative, (4) pengembangan pertanian organik, dan (5) peningkatan akses pasar bagi produk lokal. Kelima strategi tersebut dalam kaitannya dengan pemberdayaan petani, maka strategi “adaptasi terhadap perkembangan teknologi” merupakan strategi yang terus-nenerus harus dikembangkan, karena berkaitan langsung dengan kemampuan petani **beradaptasi**. Pelatihan-pelatihan (produksi, pengolahan pasca panen, manajemen usahatani), penyediaan akses terhadap formasi pasar, serta pendanaan pertanian perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha para petani. Dalam konteks ini **lembaga penyuluhan** dan **pendidikan formal pertanian** menempati posisi yang amat strategis.

Keempat strategi lainnya, menuntut adanya peran pemerintah yang dominan, misalnya menggalang kemitraan dalam perdagangan internasional, kebijakan pangan dan produk alternatif, penyediaan akses pasar bagi produk lokal. Kesemuanya itu perlu ada kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan petani.

## **B. Pengukuran Keberhasilan Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan petani, menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut. Keberhasilan pemberdayaan selama ini diukur menurut aspek yang ditentukan, dibandingkan sebelum dengan sesudah pemberdayaan atau dibandingkan antara kelompok yang mengikuti pemberdayaan dengan yang tidak mengikuti pemberdayaan. Aspek tersebut antara lain tingkat partisipasi, produktivitas, pendapatan (*income*), efisiensi dan penggunaan teknologi, jumlah kegiatan dan personil terlibat, kapasitas produksi, jangkauan pemasaran, prasarana dan sarana yang dibangun, tingkat kesehatan, serapan dana modal/investasi/dana bergulir, dan sejenisnya. Bahkan *The Community Empowerment Collective Society* dalam publikasinya hingga tahun ini menyatakan terdapat enambelas aspek untuk mengukur hasil pemberdayaan.

Soeharto (2008) menyebutkan bahwa indikator keberdayaan dapat dilihat dari dua hal yaitu : (a) derajat keberdayaan, dan (b) basis keberdayaan. Derajat keberdayaan mencakup 4 hal yaitu :

- (1) tingkat keberdayaan dan keinginan untuk berubah (*power to*)
- (2) Tingkat meningkatkan kemampuan kapasitas (*power within*)
- (3) Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*)
- (4) Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*)

Sementara basis keberdayaan meliputi 5 indikator yaitu:

- (1) Pengembangan berbasis masyarakat
- (2) Keberlanjutan
- (3) partisipasi masyarakat
- (4) pengembangan modal sosial masyarakat
- (5) penghapusan ketimpangan gender

Berdasarkan uraian di atas maka hingga saat ini belum ada formula pengukuran yang terintegrasi (relatif utuh), yang ada pengukuran bersifat parsial yang mencerminkan sebagian aspek-aspek keberdayaan, selain itu juga relatif rumit. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan formula yang lebih sederhana namun lebih mencerminkan keberdayaan masyarakat. Upaya memenuhi hal tersebut, izinkan saya mempublikasikan rancangan formula hipotetik untuk pengukuran keberdayaan yang disebut *Indeks Keberdayaan Masyarakat* (IKM atau **K**), yang secara matematis dinyatakan dengan persamaan (1) berikut (Sriati, 2009) :

$$\mathbf{K} = s_1 \mathbf{C} + s_2 \mathbf{P} + s_3 \mathbf{A} \dots\dots\dots (1)$$

di mana **C** : indeks kecukupan pangan, **P** : indeks kepedulian sosial, **A** : indeks aktualisasi diri dan  $s_i$  adalah konstanta ke- $i$ , yang ditetapkan berdasar kelompok masyarakat dan kondisi wilayahnya, di mana  $i=1$  penunjuk konstanta indeks kecukupan pangan,  $i=2$  penunjuk konstanta indeks kepedulian sosial, dan  $i=3$  penunjuk indeks aktualisasi diri. Untuk pemberdayaan petani,  $s_i$  ditetapkan angka hipotetik sebagai berikut:  $s_1=0,5$ ;  $s_2= 0,3$  dan  $s_3= 0,2$ , masing-masing untuk **C**, **P** dan **A**. sedangkan untuk kelompok masyarakat lain masih perlu ditelaah lebih lanjut. Asumsi formula tersebut di atas ialah bahwa kelompok tani yang berdaya berhasil mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, mampu melaksanakan kewajiban/tugas sosialnya dan dapat mengaktualisasi diri dalam menetapkan kebijakan atau keputusan yang bersangkutan dengan masyarakatnya.

Secara teoritis jika petani mampu mencukupi kebutuhan pangan selama satu musim panen pangan (3 bulan) maka petani tersebut telah mandiri dalam arti kebutuhan pokoknya tidak tergantung orang /organisasi lain. Hal ini didukung oleh teori Maslow bahwa pangan merupakan kebutuhan utama, selain itu wajib adanya untuk energi dan kesehatan petani dan dalam keterbatasan relatif tidak dapat ditunda dibanding lainnya. Keadaan kecukupan pangan petani tersebut dinyatakan dengan *indeks kecukupan pangan* (**C**) yaitu angka yang menggambarkan seberapa jauh petani mampu mencukupi

pangannya dalam satu musim tanam secara potensial. Jadi jika ia mempunyai cadangan pangan selama 3 bulan atau kekayaan yang setara tersebut mempunyai nilai  $C = 1$ , artinya 100 persen terpenuhi kecukupan pangannya.

Petani yang berdaya sebagai anggota masyarakat akan melakukan interaksi sosial dan menunjukkan kepedulian sosialnya. Secara teoritis ia akan menempatkan diri sebagai peringan beban masyarakat dan bukan pembeban masyarakat, sehingga panggilan jiwanya lebih condong sebagai pemberi dan bukan yang diberi, atau lebih tegasnya sebagai pemberi zakat dan bukan penerima zakat. Petani yang berdaya ini akan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat atau untuk menyantuni kaum dhuafa yang lebih membutuhkan dibanding dia sendiri. Kondisi kepedulian sosial petani tersebut dinyatakan dengan *indeks kepedulian sosial (P)* yaitu angka yang menggambarkan seberapa jauh petani mampu melaksanakan pembiayaan untuk tujuan sosial. Dalam hal ini nilai  $P = 1$  jika ia telah berhasil mengeluarkan minimal 2,5 persen dari pendapatannya selama satu musim tanam.

Selanjutnya, setelah urusan pangan dan kepedulian sosial mencukupi, maka petani berusaha mengaktualisasi diri. Dalam hal ini aktivitas syi'ar nya lebih nampak, yaitu berperan dalam keputusan dan kebijakan kelompok dan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Aktivitas aktualisasi diri diukur dengan curahan waktu untuk mengikuti kegiatan organisasi sebagai anggota aktif atau pengurus (termasuk ketua). *Indeks aktualisasi diri (A)* yaitu angka yang menggambarkan seberapa jauh waktu yang digunakan petani untuk mengaktualisasikan diri di masyarakat. Dalam hal ini nilai  $A = 1$  jika telah menggunakan waktu rata-rata minimal 10 persen per hari selama satu musim tanam.

Formula pengukuran sebagaimana dinyatakan dalam persamaan (1) di atas memungkinkan cara pengukuran yang lebih mudah dan lebih obyektif terhadap keberhasilan pemberdayaan. Dalam hal ini pemberdayaan yang berhasil akan meningkatkan nilai *indeks keberdayaan* nya. Selain itu dengan ukuran ini dapat juga digunakan untuk dasar menentukan apakah suatu kelompok

masyarakat layak untuk diberdayakan atau justru anggota/kelompok masyarakat tersebut yang seharusnya memberdayakan masyarakat tersebut. Untuk itu masih terbuka bagi para akademisi untuk mengkaji lebih lanjut dayaguna pengukuran keberdayaan dengan formula *Indeks Keberdayaan Masyarakat* (IKM atau **K**) sebagaimana diuraikan di atas. Demikianlah suatu tantangan pemberdayaan masih menunggu cendekiawan dari perguruan tinggi khususnya dan lembaga lain pada umumnya.





## **BAB XI. PERSPEKTIF ADAPTASI DALAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI COVID 19, ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0**

Pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Shardlow (1998). Dalam konsep pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya (energi) manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan (*competency*), kepercayaan (*confidence*), wewenang (*authority*) dan tanggungjawab (*responsibility*) dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan (*aktivitas*) organisasi untuk meningkatkan kinerja (*performance*) sebagaimana diharapkan (Hasan Bisri, 2000).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Menurut Ife (1995) dikutip Nasdian (2014) memaknai pemberdayaan adalah “membantu” komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas. Ginnodo (1997) secara sederhana mendefinisikan pemberdayaan adalah pemberian cara dan kesempatan untuk mengambil keputusan dan melakukan aksi-aksi yang berpengaruh langsung pada komunitas.

Pandemi Covid-19 mempunyai dampak yang menyeluruh sehingga kebijakan pembangunan nasional menerapkan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan pendekatan yang menyeluruh. Ruang Lingkup Pemberdayaan masyarakat mencakup : Pemberdayaan

politik, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, dan pemberdayaan lingkungan.

Pandemi Covid 19 menuntut berbagai adaptasi di segala bidang/aspek kehidupan manusia. Perspektif adaptasi dari berbagai bidang ilmu, salah satunya adaptasi yang terkait dengan disiplin sosial ekonomi pertanian. Perspektif adaptasi dalam pemberdayaan masyarakat di masa pandemi covid 19, era industri 4.0 dan society 5.0, diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menciptakan Ketahanan Pangan Rumah tangga.

### **Konsep Adaptasi**

Adaptasi berlaku bagi setiap makhluk hidup dalam menjalani hidup dalam kondisi lingkungan yang senantiasa berubah. Menurut Bennet (1976) dan Pandey (1993) adaptasi merupakan suatu perilaku responsif manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Perilaku responsif memungkinkan individu mampu menata sistem-sistem tertentu bagi perilakunya, agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada.

Perilaku tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melampaui kondisi tertentu dan kemudian membangun strategi serta keputusan tindakan untuk menghadapi keadaan-selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa adaptasi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh manusia untuk mengantisipasi perubahan lingkungan.

Sebagai suatu proses perubahan, adaptasi dapat berakhir dengan sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Sehingga, adaptasi merupakan suatu sistem interaksi yang berlangsung terus antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Dengan demikian, tingkah laku manusia dapat mengubah suatu lingkungan atau sebaliknya, lingkungan yang berubah memerlukan suatu adaptasi yang selalu dapat diperbaharui agar manusia dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya (Bennett 1976).

Adaptasi merupakan salah satu bagian dari proses evolusi kebudayaan, yakni proses yang mencakup rangkaian usaha-usaha

manusia untuk menyesuaikan diri atau memberi respon terhadap perubahan lingkungan fisik maupun sosial yang terjadi secara temporal (Mulyadi, 2007). Terkait dengan pandemi Covid 19, maka masyarakat perlu beradaptasi menyesuaikan dengan perilaku baru yang kondusif untuk lingkungan yang sehat. misalnya: jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Perilaku itu akan menjadi kebiasaan baru, budaya baru yang berlaku dalam masyarakat., yang mencakup berbagai aspek kehidupan.

### **Konsep Ketahanan Pangan keluarga :**

Ketahanan pangan merupakan pilar utama keberlangsungan kehidupan manusia. Konsep Ketahanan Pangan dari organisasi pangan dunia FAO (Food and Agriculture Organization) dirumuskan sebagai suatu kondisi dimana semua orang, sepanjang waktu, mempunyai akses fisik sosial dan ekonomi terhadap bahan pangan yang cukup, aman dan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan makanan yang disukai untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Di Indonesia konsep ini diadopsi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan, disebutkan bahwa Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. Berdasarkan definisi tersebut terdapat 4 aspek yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan, (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi sepanjang waktu, (3) keterjangkauan/aksesibilitas terhadap pangan, serta (4) kualitas dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di Beberapa negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah

penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa.

Ketahanan pangan sebuah keluarga bertumpu pada aksesibilitas, jumlah dan ragam pangan, yang tersedia secara berkesinambungan. Terkait hal ini dapat dikategorikan 4 kelompok masyarakat, yaitu:

1. Kelompok Masyarakat yang sanggup mengupgrade dan memberdayakan dirinya sendiri dengan cepat mengikuti perubahan teknologi dan pola hidup, dapat beradaptasi dengan cepat, mengantisipasi perubahan dan melihat peluang usaha
2. Kelompok Masyarakat yang Sanggup Mengupgrade dan Memberdayakan dirinya dengan dukungan minimal dari luar.
3. Kelompok Masyarakat yang perlu didukung dalam pemberdayaannya dengan meningkatkan kesadaran adanya perubahan cepat yang perlu segera diantisipasi, disertai dengan dukungan yang memadai dari tim yang berkompeten.
4. Kelompok Masyarakat yang lambat merespon perubahan karena kurang kemampuan (wawasan, kesadaran dan modal social lainnya).

Dengan adanya pandemi Covid 19. sedikit banyak berdampak pada ketahanan pangan rumah tangga. Berbagai upaya pemberdayaan dilakukan sesuai dengan proses pemberdayaan.

Terdapat tiga upaya pokok dalam proses pemberdayaan:

1. Bina Manusia. Bina Manusia, merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Bina manusia mencakup: Pengembangan kapasitas individu, kapasitas entitas, kelembagaan dan kapasitas sistem / jejaring)
2. Bina usaha, yang mencakup : Pemilihan komoditas, perencanaan usaha, pembentukan badan saha, pengelolaan SDM dan Karir, Manajemen Produksi dan Operasi, Manajemen logistik dan operasional, dan lain-lain.

3. Bina lingkungan. (misalnya CSR). Termasuk dalam tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja), maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/perseroan
4. Bina Kelembagaan, yang mencakup komponen person, komponen tujuan/kepentingan, komponen aturan, dan komponen struktur.

Untuk mencapai ketahanan Pangan Keluarga harus melakukan adaptasi-adaptasi sehingga tetap berdaya, mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adaptasi dalam proses pemberdayaan meliputi :

1. adaptasi nilai-nilai (kedisiplinan, taat/patuh)
2. Adaptasi perilaku (kreatif, produktif)
3. Adaptasi teknologi (proses produksi, komunikasi)
4. Adaptasi kelembagaan (ekonomi, sosial, budaya)
5. Adaptasi lingkungan (peduli lingkungan)

### **Konsep Society 5.0**

Seiring perkembangan jaman, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan manusia menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, Robot) untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri 4.0.

Konsep resolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh, hanya saja konsep Society lebih focus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya.

Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian yaitu saat manusia sudah mengenal bercocok tanam (kebutuhan subsisten). Pada Society 3.0: sudah memasuki era industri yaitu pada saat manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Pada Society 4.0: suatu era yang kita alami saat ini, manusia sudah mengenal komputer hingga internet dan Society 5.0 yaitu era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam society 5.0 nilai baru diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dan lainnya pada masa mendatang.

Berasarkan uraian makna konsep di atas, perspektif adaptasi dalam pemberdayaan masyarakat menuju ketahanan pangan keluarga di masa pandemi, terdapat 4 katagori masyarakat, yaitu:

- a. Kelompok Masyarakat terdiri dari keluarga yang berhasil memanfaatkan peluang dan aktivitas produktif sehingga Ketahanan Pangan Keluarga (KPK) baik atau lebih.
- b. Kelompok Masyarakat yang terdiri dari keluarga yang hanya mampu bertahan dan cukup saja untuk kepentingan dirinya sendiri.
- c. Kelompok Masyarakat yang terdiri dari keluarga kekurangan pangan akibat berkurang atau tertutupnya peluang dan akses produktif karena berbagai sebab, terkait dengan kemampuannya beradaptasi
- d. Kelompok yang sudah establish pada katahanan yang tinggi, harus mempunyai kesedaran kolektif untuk membantu keluarga yang berketahanan pangan rendah. Disinilah perlu semangat menumbuhkan nilai –nilai luhur bangsa, semangat gotong-royong, peduli sesama, untuk masyakat adil makmur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian, 2015. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- Basuno, Edi dan Suhaeti, Rita Nur . 2007. Analisis Bantuan Pinjamam Langsung Masyarakat (BPLM) : Kasus Pengembangan Usaha Ternak Sapi di Propinsi Sulawesi Selatan. Analisis Kebijakan Pertanian: Vol.5 No.2, Juni 2007 : 150-166
- Dillon, H.S. 2004. Pertanian Membangun Bangsa. *dalam* Husodo *et al.* (ed) Pertanian Mandiri. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Doeriat, A.W. 1990. Realitas Baru dalam Kewirausahaan dan Manajemen dalam Widyahartono, B., B. Aly dan S. Suharto (ed): Indonesia dalam Era Globalisasi. Bank Summa, Jakarta.
- Drucker, P.F. 1993. Post-capitalist Societ. Oxford: Butterwort-Heinemann.
- Duncan, W.J., P.M.Ginter dan L.E.Swayne.1996. Strategis Management of Health Care Organization. Blackwell Publisher Inc., Cambridge.
- Febriana D.I, Stiti Rochani, dan Atik, C.B. 2015. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Pinilih” di desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Febriana, dkk, Febriana Dwi Irawati, Siti Rochani CH, dan Atik Catur Budiati Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,



Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
Febrianaira43@gmail.com

Firmansyah, H. 2012. Ketercapaian indikator keberdayaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Kota Banjarmasin. *Jurnal Agribisnis Pedesaan* 02 (02) : 172-180.

Gidens, A. 1999. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Blackwell Publisher, Ltd. Maiden

Hamilton P. 1990. Talcott Parson dan Pemikirannya. Sebuah Pengantar. Alih Bahasa Hartono Hadikusumo. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Hapsoro, D.N.Y. and Gunanto, G., 2013. Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2): 1-12.

Hikmat, Harry, 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora.

Ife, J. dan F. Tesoriero. 1995. *Community Development . Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* :Yogyakarta (ID) : Pustaka Pelajar.

Jamasy, O. 2001. *Pembangunan Pertanian melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Bina Swadaya. Jakarta.

Jia, H., Ma, H. and Wei, M., 2011. Urban wetland planning: A case study in the Beijing central region. *Ecological Complexity*, 8(2): 213-221.

Krisnamurti, B. 2006. *Revitalisasi Pertanian : Sebuah konsekwensi sejarah dan Tuntutan Masa Depan*. Dalam revitalisasi Pertanian Dialog Beradaban. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Lantz, V., Boxall, P.C., Kennedy, M. and Wilson, J., 2013. The valuation of wetland conservation in an urban/peri urban watershed. Regional Environmental Change: 1-15.

Ma'arif, S. 2008. Kepemimpinan : Kunci Keberhasilan Pengembangan Agribisnis dan agroindustri dalam Menghadapi Dinamika. Dalam : Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Perspektif Ilmu-ilmu Pertanian dalam pembangunan Nasional. Penyunting Tridoyo Kusumastanto dan Tim. Penebar Swadaya dan IPB Press. Jakarta.

Marquardt, M. dan A. Reynolds (1994). The Global Learning Organization. Irwin Professional Publishing. New York.

Mardikanto, Totok. 2010. Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Maxwell, J.C. 1995. Mengembangkan kepemimpinan di dalam Diri Anda. (Edisi terjemahan dlm Bhs Indonesia). Binarupa Aksara, Jakarta

M. Ihsan Dacholfany. 2018. Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan on Formal di Metro Lampung. (Studi Kasus PKBM AL-SUROYA), TAPIS, Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018, hal. 43-74.

Nangoi, R. 2004. Pemberdayaan di Era Ekonomi Pengetahuan. Penerbit PT Grasindo, Jakarta.

Nasdian, FT. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta (ID) : Yayasan Pustaka Obor Indoneisa.

Nuhung, I.A. 2006. Bedah Terapi Pertanian Nasional. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.

- Pambudy, R. 2003. Penyuluhan dalam Sistem dan Usaha Agribisnis : Strategi Pengembangan Modal Manusia Indonesia, hal 229-240. Dalam I. Yustina dan A. Sudrajat (edt). *Membentuk pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press. Bogor.
- Pranaji, T. 2003. Diagnosa Kerapuhan Kelembagaan Perekonomian Pedesaan. *Forum Penelitian Agroekonomi*. Vol.21. No.2., Desember 2003 :126-142.
- Puji Hadiyanti, 2008. Pemberdayaan melalui Program Ketrampilan Produktif di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rawasari Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan - Vol. 17 Th. IX April 2008* :hal. 90-99.
- Saragih dkk. 2001. Pembangunan Pertanian Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. (editor : Owin Jamasy, dkk). Bina Swadaya. Jakarta.
- Sriati, 2009. Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan Agribisnis sebagai Pilar Pembangunan Nasional. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya.
- Sriati. 1991. Analisis Kebutuhan Pelatihan Peternak Sapi Perah di Kabupaten Bogor. Thesis Program Magister. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sriati. 1996. Peran Pemimpin Setempat dalam Proses perubahan Perilaku Petani dalam Diversifikasi Pertanian (Kasus di Kabupaten Kediri dan Trenggalek, Jawa Timur). Disertasi Doktor. Program Pascasarjana Universitas Padjadaran. Bandung.
- Sriati, N. Hakim, N Herawati. 2002. Analisis Proses Adopsi Teknologi Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP) dan

Pengaruhnya terhadap Produksi cabai Merah Keriting (Prosiding Seminar Nasional Agribisnis dan Agroindustri, 7-Oktober 2002), ISBN : 979-587-222-2

- Sriati, N. Hakim, dan Masriyadi. 2004a. Respon Petani terhadap Kredit Usaha Tani dan hubungannya dengan Produktivitas serta Pendapatan Usahatani di Desa Banpres Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal KPM, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Vol 1, No.1, Agustus 2004: 24-29.
- Sriati. 2004b. Penerapan Teknologi Atabela (alat tabur benih langsung) dan hubungannya dengan produksi padi dan Pendapatan Petani di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buay Madang, Ogan komering Ulu. *Jurnal KPM, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Vol 1, No.2, Agts.2004: 114-123.
- Sriati, S.Oktarina, dan D. Efrida. 2004c. Dinamika Kelompok Tani Peserta Sekolah Lapangan Agribisnis (SL-A) dan Ketrampilannya dalam Pemeliharaan Jagung Pioneer di Desa Indralaya, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir. *Jurnal KPM, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Vol 1, No.3. Desember 2004 : 114-123.
- Sriati, Y. Junaidi. dan I. Idris. 2004d. Pembinaan kelompok Petani Kecil dan Hubungannya dengan Pemanfaatan Kredit pada Proyek P4K di Desa Senuro OKI. *Jurnal Dinamika Pertanian*. Vol.XIX No. 3. Desember 2004: 336-34. Terakreditasi No. 39/Dikti/kep.2004.
- Sriati. Y Junaidi, dan A. Apriadi. 2007<sup>b</sup>. Hubungan Curahan Tenaga Kerja Wanita dengan Pendapatan Usahatani Padi Lebak di Desa Pemulutan Ulu, Ogan ilir. *Jurnal KPM, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Vol 3.No.1, April 2007: 26-30.
- Sriati, Hakim, N dan I.Hutasoit. 2007<sup>d</sup>. Perilaku Petani dalam Pemasaran Hasil Kakao dan Hubungannya dengan Pendapatan

Petani (Kasus di Desa Bandar Silou, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara) *Jurnal Dinamika Pertanian* Vol XXII No 2: 142-151, Agustus 2007. Terakreditasi No 39/Dikti/Kep/2004.

Sriati, Riswani, S.Ardi. 2007<sup>a</sup>. Hubungan antara Respon Petani terhadap Proyek Pengembangan Bangkit Kedelai dengan Produksi dan Pendapatan (Kasus di Desa Lorok Kec. Indralaya, Ogan Ilir). *Jurnal Agribisnis dan Industri Pertanian*. Vol 6, No 1 : 19-28. April 2007. Terakreditasi No 55/DIKTI/Kep/2005.

Sriati, A.K. Yusuf, dan A. Sucipto. 2007<sup>c</sup>. Studi Pemberdayaan Wanita Tani Melalui Usaha kebun Kolektif (kasus pada Kelompok Swadaya Masyarakat Lestari, Tanjung Seteko, Ogan Ilir). *Jurnal SOSIO EKONOMIKA* Vol 13, No 1 : 63-74). Juni 2007. Teraskreditasi No : 55/DIKTI/Kep/ 2005

Sriati, Y. Junaidi. L.A. Agustina. 2008. Pola Kemitraan antara Petani Tebu Rakyat (TR) dengan PTPN VII Unit Bungamayang dalam Usahatani Tebu (Kasus di Desa Karang Rejo, Kecamatan Sungai Selatan, Lampung Utara). *Jurnal SOCA*. Vol.8. No.2. Juli 2008. ISSN-1411-7177. Terakreditasi No : 108/Dikti/Kep2007.

Sriati, N. Hakim, dan T. Suroso. 2003<sup>a</sup>. Hubungan antara Aktivitas Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan Pengelolaan Usahatani Padi di Lahan Pasang Surut Desa enggal Rejo Air Saleh Musi Banyu Asin. (Prosiding Semiloka Nasional, Ketahanan Pangan dalam era Otonomi Daerah dan Globalisasi 2-4 Maret 2003, ISBN : 979-95580-5-0)

Sriati, N. Hakim, S. Riady. 2003<sup>b</sup>. Analisis Tingkat Adopsi Padi Varietas Ciliwung dan Hubungannya dengan Produksi dan pendapatan Petani di kecamatan Belitang II, OKU (Prosiding Semiloka Nasional, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

dalam Era otonomi Daerah dan Globalisasi, 2-3 Mei 2003, ISBN : 979-95580-4-2)

Sriati, Maryati, R. Suryaningsih. 2003<sup>c</sup>. Correlation between Farmers Adoption on Bokashi Fertilizer with Production and Income of red Chili Farming in Sako Village Musi Banyu Asin. (The nternational Seminar on "The Organic Farming and Sustainable Agriculture in Tropics and Subtropics : Science, technology, Management and Social Welfare" on October 8-9, 2003, ini Palembang, South Sumatra, Indonesia)

Sriati. 2008. Analisis Kemampuan, Motivasi dan Kinerja Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian dan Hubungannya dengan Kinerja Petani (Kasus di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan). Makalah disampaikan pada Seminar kenaikan Jabatan dari Lektor Kepala ke Guru Besar, 17 September 2008. Palembang

Sukirno, Sriati. dan A. Minha. 2008. Analisis Perbandingan tingkat Kinerja Peternak Sapi Bali Mandiri dan Peserta Program Pengembangan Peternak Kecil (P3K) Palembang I

Supriyatni, T. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Rineka Cipta. Jakarta.

Sumarti, T, Rokhani, S.F. Falatehan . 2017. Strategi Pemberdayaan Petani Muda Kopi Wirausaha di Kabupaten Simalungun. Jurnal Penyuluhan. 13(1) : 31-39.

Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Suryana, A. 2005. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional. Makalah Kabalitbang Deptan, disampaikan pada Seminar Sistem Pertanian Berkelanjutan

untuk Mendukung Pembangunan Nasional, tanggal 15 Maret 2005 di Universitas Sebelas Maret, Solo.

Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penamggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006 (hal 1-16)

Supsilani. 2019. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal .*Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5 (1) (2019): 20-30, DOI: <https://doi.org/10.24114/antro.v5i1.13172> . Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>

Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 5. No 1, Maret. 2007: 15-35. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Deptan. Jakarta.

Tjondronegoro, S.M.P. 2005. Pembangunan, Modal dan Modal Sosial, *Jurnal Sosiologi Indonesia* No. 07/2005.p.10-14. Penerbit Ikatan Sosiologi Indonesia. Jakarta..

Uphoff., Norman. 1986.. *Local Institution development; An Analitical With Cases*. Rural Developmental Committe, Cornell Univercity, kumarian Press. USA.

Utami, Adelia; Sriati, dan Yunindyawati. 2019. Hubungan Peran Pendamping dengan Partisipasi Pelaku Industri Rumahan dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang. *Jurnal Penyuluhan* 15 (1) : 144-153.

Via Lailatur Rizki, Ninik Lukiana, Kusnanto Darmawan. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaa Mikro Kecil Menengah di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.02, No.01, Januari, 2022, pp. 709-714. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal> .

---





## INDEKS

- A  
Aktivitas, 11, 130  
Agent of change, 25  
Agri support activities, 53  
Akuntabilitas, 16  
Aspek anatomik, 1.  
Aspirasi hidup, 16  
Assesment, 44  
Authority, 11, 130
- B  
Badan Usaha Milik Negara, 102  
Bankable, 96  
Bantuan Pangan Non Tunai,  
87, 88  
Better business, 114  
Better farming, 114  
Better institutions, 21  
Better living, 114  
Bina kelembagaan, 50  
Bina lingkungan, 50  
Bina usaha, 49  
BSI, 87  
BOS, 86  
BKM, 85
- C  
Capacity, 9  
Capacity building, 113  
Capital collateral, 96  
Character, 96  
Concensus, 20  
Community building, 20  
Community development, 12, 30,  
113  
Community network, 32  
Competency, 11  
Convidence, 11  
Community ownership, 18  
Confronting Structural  
Disadvantages, 16  
Conducive business climate, 96  
Corporate Social Responsibility,  
50  
CERD, 31
- D  
Dana hibah bergulir, 96  
Deprivation, 77  
Desentralisasi, 16
- E  
Economically viable, 10  
Educator, 57  
Educational roles, 57  
Empowerment, 9  
Enabler, 57  
Environmental friendly, 10  
Equity, 9  
Establish way of behaving, 52  
Exogenous change, 61  
External expertise, 19  
External factor, 40

F  
 Family Development Session (FDS), 84  
 Fast moving enterprise, 95  
 Feasible, 96  
 Feel need, 120  
 Fisiologik, 1

G  
 Gapoktan, 118  
 Gate way institution, 119  
 Garis kemiskinan, 75  
 Grasroot, 55  
 Growth, 1  
 Guarantee system, 96

H  
 Hak-hak istimewa, 64  
 Human right, 16

I  
 Implementasi, 45  
 Income generating, 25, 42, 54  
 Indeks Keberdayaan Masyarakat (IKM), 129  
 Indeks Kecukupan Pangan, 129  
 Indigenous technology, 25  
 Indikator kemiskinan, 80  
 Industri rumahan, 34  
 Information technology, 101  
 Inklusif, 20  
 Innovation, 1  
 Institution, 51  
 Interdependency, 9  
 Integrated development, 16

Invention, 6

J  
 Jejaring komunitas, 32

K  
 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 87  
 Kelompok Petani Kecil (KKP), 118  
 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 87  
 Kemiskinan absolut, 75  
 Kemiskinan alamiah, 79  
 Kemiskinan buatan, 79  
 Kemiskinan relatif, 75  
 Komponen aturan, 51  
 Komponen kepentingan, 51  
 Komponen person, 51  
 Komponen struktur, 51  
 Konsensus, 20  
 Konsep Pembangunan, 1  
 Konsep Pemberdayaan Masyarakat, 11  
 Konsep Kemiskinan, 73, 74  
 Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), 34  
 Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKPE), 102  
 Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), 102  
 Kriteria UMKM, 92  
 KUF (The Kalimantan Up Land Farming System), 117

- L
- Liberalitation, 1, 6
  - Local development, 55
  - Locality development. 56
  - Livehood activities, 94
- M
- Masyarakat tradisional, 1
  - Micro interprise. 94
  - Modernisasi, 3,4
  - Modernizatin, 6
  - Mores, 52
- N
- National building, 1,
  - Nomor Induk Kependudukan, 87
- O
- Organic development, 19
- P
- Partisipasi, 64
  - Pembangunan Berkelanjutan, 8
  - Pembangunan Nasional, 7
  - Pembinaan ideologi, 8
  - Pembangunan Bangsa,7
  - Pengembangan, 7
  - Pembebasan, 6
  - Pembaharuan, 6
  - Pembinaan, 8
  - Pendidikan Luar Sekolah (PLS), 109
  - Pendidikn Non Formal, 105,106
  - Pengembangan kapasitas, 48
  - Penguatan kapasitas, 113
- Perspektif adaptasi, 130
  - Perubahan terencana, 25, 35
  - Pertumbuhan ,1
  - Poverty alleviation,48
  - Poverty reduction, 48
  - Prinsip Keberlanjutan, 16
  - Prinsip kesetaraan, 15
  - Prinsip Partisipasi,15
  - Prinsip keswadayaan,16
  - Privatisasi, 16
  - Program Indonesia Pintar (PIP), 89
  - Program Keluarga Harapan (PKH), 84
  - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),102
  - Program Raskin, 86
  - Proverty line, 75
  - Proverty threshold, 75
  - PUAP, 102
  - PNPM, 102
  - Planed change, 35
- Q
- R
- Real need, 120, 121
  - Recontruction, 1
  - Rekontruksi, 3
  - Relief and welfare,55
  - Representational roles, 57
  - Responsibility, 11
  - Ruang lingkup pemberdayaan, 47
  - Rural areal development, 12
  - RPPK, 118

S  
 Sekolah Lapang Agribisnis, 121  
 Seleksi okasi, 38  
 Self reliance, 18  
 Self organizing, 39  
 Small dynamicenterprise, 94  
 Society 5.0. 134  
 Social action, 55  
 Social engineering, 29  
 Social inquiry, 59  
 Social institution, 51  
 Social marketing, 30  
 Social network, 61  
 Social organizatin, 51  
 Social planing, 55  
 Strategi diect-action, 55  
 Stakeholder, 97, 123  
 Supra Insus, 117  
 SUTPA, 117  
 Sustainability, 9  
 Sustainable Sistem Development, 5, 56  
  
 T  
 Tahap konsumsi tinggi,2  
 Tahap tinggal landas, 2  
 Tahap transisional,2  
 Task group, 11  
 Technical assistance and facilitation, 96  
 Technical Roles, 58  
  
 Tebu Rakyat Kredit (TRK), 124  
 Tebu Rakyat Bebas (TRB), 124  
 Teologi pembebasan, 6  
 Terminasi, 45  
 Tokenism, 69  
 Top-down,31,55  
 Transparansi, 16  
  
 U  
 Urbanisme,5  
 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 91  
 Utusan dan wakil, 57  
  
 V  
  
 W  
 Westernization, 1  
 Westernisasi,4  
  
 X  
  
 Y  
  
 Z  
 Zero emission, 10

## PENULIS



Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S. adalah Guru Besar pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Tamat pendidikan Sarjana, di IPB Bogor tahun 1983 dan memulai karier sebagai CPNS di Universitas Sriwijaya (Unsri) sejak tahun 1984. Pendidikan Magister/S2 di Institut Pertanian Bogor, diselesaikan tahun 1990. Pendidikan Doktor ditempuh di Universitas Padjadjaran, dan lulus tahun 1996. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Laboratorium Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan FP Unsri (1996-1998), Ketua Unit Pengaduan Masyarakat FP Unsri (1997-2000), Ketua Program Studi S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (2002-2005). Dan Ketua Program Studi S2 Magister Agribisnis Program Pasca Sarjana Unsri (2005-2008). Jabatan Guru Besar bidang ilmu Ilmu Pertanian ditetapkan tahun 2008. Penulis sebagai pengampu beberapa mata kuliah dan juga membimbing tugas akhir mahasiswa pada jenjang Sarjana (S1), Fakultas Pertanian dan FISIP), Program Magister (S2) (Agribisnis, Kependudukan, Lingkungan, Sosiologi, dan Administasi Publik) dan Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian, Ilmu Lingkungan, dan Administrasi Publik. Universitas Sriwijaya. Mata kuliah tersebut antara lain: Metode Penelitian Sosial, Metode Ilmiah, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Statistika Non Parametrik, Ekonomi Kelembagaan, Penyuluhan Pertanian, Manajemen Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, Pengantar Ilmu Komunikasi, Sosiologi Pembangunan, Sosiologi Lingkungan, Filsafat Komunikasi, Konsep dan Isu Pembangunan, dan Kearifan Lokal. Buku yang diterbitkan : Metode Penelitian Sosial (Unsri Press, 2013, ISBN: 979-587-456-X), dan Paradigma Baru Sistem Pendidikan (Book Chapter), Penerbit Refika Aditama, November 2020, ISBN 978-623-7060-85-7.

# Pemberdayaan Masyarakat

---

## ORIGINALITY REPORT

---

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

1%

★ [jurnal.unigal.ac.id](http://jurnal.unigal.ac.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%